

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan analisis teks dan konteks pada Surat Kabar harian SOLOPOS pada bab sebelumnya, penulis pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil analisis mengenai kasus dugaan korupsi Bupati Karanganyar terhadap perumahan Griya Lawu Asri (GLA). Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang disampaikan pada Bab I, yaitu bagaimana Surat Kabar Harian SOLOPOS membingkai pemberitaan kasus dugaan korupsi Bupati Karanganyar Rina Iriani dalam proyek pembangunan perumahan Griya Lawu Asri ?

#### **Konstruksi Solopos Terhadap Kasus Dugaan Korupsi Bupati Rina dalam Proyek Pembangunan Perumahan Griya Lawu Asri**

1. *Frame* SOLOPOS dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi terhadap aliran dana perumahan Griya Lawu Asri adalah dengan mengangkat pihak-pihak atau saksi-saksi yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perumahan Griya Lawu Asri (GLA) tersebut, salah satu yang menjadi fokus adalah Bupati Karanganyar, Rina Iriani. Hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam kasus ini. Selain itu, kasus ini masih terus bergulir dan keterlibatan sejumlah pihak belum diusut secara tuntas oleh pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dan juga persidangan selalu menjadi *headline* dalam

pemberitaan ini, termasuk juga keterlibatan Bupati Rina dalam kasus dugaan Korupsi perumahan Griya Lawu Asri. Dengan *frame* ini dapat diketahui bahwa keberpihakan SOLOPOS dalam pemberitaannya adalah, karena korupsi merupakan fenomena yang menarik dan mendapat perhatian khusus bagi SOLOPOS untuk diberitahukan secepat mungkin kepada masyarakat.

2. Surat kabar harian SOLOPOS dalam mengkonstruksi realitas tentang kasus dugaan korupsi perumahan Griya Lawu Asri dan keterlibatan Bupati Rina Iriani berpedoman pada prinsip profesionalitas. Hal ini berdasarkan dari informasi dan fakta yang ada dilapangan dan juga dari hasil persidangan, dengan tetap memegang *accurate*, *clear*, dan *balance*.
3. Tujuan SOLOPOS dalam pemberitaan ini adalah menekankan kepada masyarakat bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Selain itu juga, korupsi dapat mengganggu kestabilan suatu daerah bahkan sampai ke nasional, oleh sebab itu SOLOPOS sebagai *media leader*, sangat *concern* terhadap pemberitaan mengenai korupsi.

## **B. SARAN BAGI PENELITI LAIN**

1. Penelitian tentang kasus dugaan korupsi Bupati Karanganyar, Rina Iriani terhadap perumahan Griya Lawu Asri yang diteliti menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki, ini menekankan pada cara SOLOPOS menunjukkan pemaknaan mereka atas peristiwa kasus dugaan korupsi perumahan GLA. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan menggunakan model

framing yang berbeda seperti model framing dari Robert entman, Murray, ataupun milik William Gamson.

2. Penelitian ini bisa dikaji menggunakan metode lainnya, misalnya analisis isi (*content analysis*) untuk melihat kecenderungan isi media terkait peristiwa dugaan korupsi perumahan Griya lawu Asri untuk menunjukkan secara kuantitatif perbedaan-perbedaan isi dari beberapa media.
3. Selain itu, subyek yang diambil bisa menggunakan dua media sebagai pembandingan (*comparative*), hal ini digunakan untuk melihat bagaimana *frame* atau kecenderungan peristiwa yang diangkat dua media itu dalam satu kasus.
4. Metode wawancara mendalam (*depth interview*) lebih memperjelas praktek framing yang dilakukan media. Dengan melakukan wawancara mendalam kepada praktisi media, penulis akan mengetahui lebih mendalam alur lahirnya berita dari sebuah wacana menjadi berita. Namun yang menjadi persoalan adalah keterbukaan narasumber, untuk itu penulis selayaknya melakukan pendekatan terlebih dahulu pada narasumber sehingga apa yang ingin ditanyakan terjawab semua .

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadnya. 2005. *Penulisan Berita*. Yogyakarta: Andi Offset. Edisi kedua
- Aditjondro, George J. Dalam Said, Sudirman dan Nizar Suhendra. 2002. *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku I: dari Puncak sampai Pasar. Aksara Foundation Cetakan I. Jakarta
- Alatas. 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES
- Birowo, M. Antonius. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi, Teori, dan Aplikasi*. Gitanyali, Yogyakarta.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara
- Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara
- F. Rachmadi. 1990. *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers Berbagai Negara*: Jakarta. PT. Gramedia
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, edisi Kedua.
- Kartono, Kartini. 1983. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Edisi Baru. CV. Rajawali Press.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Lubis, Mochtar. 1977. *Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri*. Jakarta: Bhratarana Karya Aksara.

- LSPP.2005. *Media Sadar Publik: Media Lokal Mewartakan Korupsi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. Cetakan I
- McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muis, Abdul. 2000. *Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik*, Cetakan I. Jakarta: Penerbit Harian Kompas
- Pareno, Abede Sam H. 2003. *Manajemen Media: Antara Idealisme dan Realita*. Surabaya: Papyrus.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1991. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya.
- Said, Sudirman dan Nizar Suhendra.2002. *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku I: dari Puncak sampai Pasar. Aksara Foundation Cetakan I. Jakarta.
- Shoemaker, P. And Stephen D. Reese. 1996. *Mediating The Message: The Theory of Influence of Mass Media Content*. Longman, New York.
- Siregar, Ashadi, dkk. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana. Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: Lkis

Sudibyo, Agus. 1999. *Citra Bung karno, Analisis Berita pers Orde Baru*. Yogyakarta. Bigraf Publishing.

**Sumber Elektronik:**

Ibrahim Fahmy Badoh, indeks korupsi Indonesia 2006, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses 27 Mei 2011

merriam-websteronlinedictionary,

(<http://www.merriamwebster.com/dictionary/corrupts>).

Paul SinlaEloE, dalam <http://groups.yahoo.com/group/indonesian-studies>

Robert Klitgaard & Ronald Maclean, Penuntun Pemberantasan Korupsi,

sebagaimana dikutip Betty Rosalina dalam [http://www.kammi.](http://www.kammi.or.id/last/lihat.php?)

[or.id/last/lihat.php?](http://www.kammi.or.id/last/lihat.php?) Transparency Internasional (TI) Indonesia , dalam

<http://www.ti.or.id/polling/9/>

Thamrin, Muhammad

Husni, [http://209.85.175.104/search?q=cache:YFUQ0MxLdGoJ:thamrin.](http://209.85.175.104/search?q=cache:YFUQ0MxLdGoJ:thamrin.blogspot.com/2006/05/indonesia-and-corruption.d=materi&do=view&id=240)

[blogspot.com/2006/05/indonesia-and-corruption.](http://209.85.175.104/search?q=cache:YFUQ0MxLdGoJ:thamrin.blogspot.com/2006/05/indonesia-and-corruption.d=materi&do=view&id=240)

[d=materi&do=view&id=240](http://209.85.175.104/search?q=cache:YFUQ0MxLdGoJ:thamrin.blogspot.com/2006/05/indonesia-and-corruption.d=materi&do=view&id=240)

<http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihataboutcorruption&id=3>

<http://adln.lib.unair.ac.id>

<http://repository.unikom.ac.id>

<http://www.wikipedia.com>

<http://www.pwi.or.id/sejarah/>

**Artikel :**

Ardisasmita, Syamsa (Deputi Bidang Informasi dan Data). 2006. *KPK: definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel* (diunduh dari <http://www.kpk.go.id>).

**Sumber lain :**

Pusat Dokumen Solopos

Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) SOLOPOS.

Media Kit SOLOPOS



# LAMPIRAN

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Y Bayu Widagdo  
Jabatan : Pemimpin Redaksi HU SOLOPOS  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto 190 Solo  
Telp. (0271) 724811

menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Indriyani  
NIM : 030902199  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Alamat Kampus : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan Redaktur Pelaksana HU SOLOPOS (Bapak Anton Wahyu P) di Griya Solopos, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, untuk kepentingan skripsi berjudul "*Kasus dugaan korupsi perumahan Griya Lawu Asri*" (analisis framing pemberitaan kasus dugaan korupsi Perumahan Griya Lawu Asri di Harian Umum SOLOPOS edisi Maret-Agustus 2011). Surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Strata I.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Solo, 26 Mei 2011

  
Y Bayu Widagdo  
Pemimpin Redaksi



Espos/Tri Rahayu

aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Sragen, Senin (8/3). Dalam aksi unjuk rasa dari jabatan.

## Kasus GLA Karanganyar "Segera periksa Bupati Rina"

Semarang (Espos)

Handoko Mulyono, tersangka dugaan korupsi pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar senilai Rp 15 miliar akan mengajukan penangguhan penahanan.

"Kami berencana mengajukan penangguhan penahanan," kata kuasa hukum Handoko, Dwiyono Notosaputra SH ketika ditemui wartawan di sela mendampingi pemeriksaan kecilnya di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng, Senin (8/3).

Selain Dwiyono, ada tujuh pengacara lainnya dari Lembaga Asosiasi Caraka Nusantara dari Jakarta yang mendampingi pemeriksaan Ketua KSU Sejahtera Karanganyar tersebut. Alasan penangguhan penahanan, sambung dia, karena belum tentu dalam kasus dugaan korupsi tersebut yang menikmati uang dan pelakunya hanya kliennya saja.

Menurut dia, ada aktor intelektual dalam kasus tersebut. Dia juga mendengar dari keterangan saksi yang telah diperiksa penyidik Kejakti jika kasus tersebut juga melibatkan Bupati Karanganyar, Rina Iriani dan suaminya, Toni Haryono.

### "Segera periksa....." sambungan dari Hal SOLORAYA

"Kami mendengar dari keterangan saksi Neta, staf KSU Sejahtera ada aliran dana ke Rina Center atas permintaan dari Toni," tandasnya.

Mengenai nilainya, Dwiyono mengaku belum mengetahui. Untuk itu, dia meminta penyidik Kejakti menelusuri aliran dana dari KSU Sejahtera tersebut. "Bupati Karanganyar dan suaminya sangat perlu untuk diperiksa," katanya.

Dijadwalkan penyidik Kejakti, Selasa (9/3) akan memeriksa Toni Haryono, terkait dugaan korupsi GLA. Lebih lanjut, Dwiyono menilai langkah

penyidik Kejakti terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan status tersangka dan penahanan kepada kliennya.

Kajakti Jateng, Salman Maryadi menyatakan tak akan terbang pilih dalam menangani kasus itu. Hal tersebut diungkapkan setelah acara peresmian Gedung Kejari Solo, Senin (8/3).

Salman menyatakan, pihaknya akan memeriksa 15 orang saksi antara lain pegawai dari Koperasi Serba Usaha yang menangani proyek tersebut. Mengenai kemungkinan bertambahnya tersangka, Salman mengatakan, akan menunggu

alat bukti yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan kasus tersebut.

Sementara itu, Muh Saifuddin SH yang mengaku Penasihat Hukum Handoko Mulyono, mengatakan, materi pemeriksaan saksi staf KSU Sejahtera, Neta, baru sampai tahap pembangunan perumahan GLA dan belum menyentuh keterlibatan Bupati.

Terpisah, Toni Haryono dan Bupati Rina Iriani tidak dapat dikonfirmasi. Tidak ada jawaban dari nomor telepon genggam keduanya yang dihubungi Espos, kemarin malam. ☐ oto/m85/try

# 7 Parpol diduga terima dana GLA

**Semarang (Espos)**

Tujuh partai politik (Parpol) di Kabupaten Karanganyar diduga menerima aliran dana korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar. Namun, hal ini dibantah oleh Parpol-parpol tersebut.

● Oleh: Tim Espos

Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jawa Tengah, Senin (14/6), ketujuh Parpol itu masing-masing Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Pelopor.

Besaran dana yang diterima Parpol pengusung pasangan Rina Iriani-Paryo-

no pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karanganyar 2008 silam itu bervariasi mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Aliran dana terbesar diduga diterima PKS yang nilainya disebut-sebut mencapai Rp 1,2 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajakti) Jateng Salman Maryadi ketika dimintai konfirmasi wartawan di Semarang, Senin (14/6), menyatakan adanya dana GLA

yang mengalir ke Parpol berdasarkan keterangan saksi dan tersangka. "Dari keterangan saksi, tersangka dan bukti-bukti yang ditemukan penyidik pada pemeriksaan terdahulu, diduga ada aliran dana GLA ke Parpol di Karanganyar," ujarnya.

Menurut Salman, penyidik Kejakti Jateng telah memeriksa sejumlah pimpinan Parpol, antara lain Sekretaris DPC PD Kabupaten Karanganyar, Bambang Priyono.

Sedang pemeriksaan terhadap saksi-pengurus Parpol lainnya dijadwalkan dilakukan pada Rabu (16/6) mendatang. "Kami akan menelusuri aliran dana GLA kepada siapa saja," ujar Salman didampingi penyidik Kejakti Gatot Guno Sembodo.

Disinggung pemeriksaan terhadap Bupati Karanganyar Rina Iriani, Kajakti tak bersedia berkomentar. "Kita lihat saja nanti, tunggu dulu," tandasnya.

**Bersambung ke Hal 7 Kol 1**

## Kasus Griya Lawu Asri (GLA)

● **20 Desember 2006**

Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

● **Juli 2009**

Ratusan rumah dari 1.370 unit rumah yang berdiri di atas lahan seluas 18,2 hektare itu dalam kondisi mangkrak. Dari 1.370 rumah yang direncanakan dibangun, baru terealisasi 700 unit.

● **10 Agustus 2009**

Tim Pencari Fakta (TPF) GLA Jeruksawit Komisi B DPRD Karanganyar dibentuk.

● **6 September 2009**

Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar melakukan investigasi.

● **15 Januari 2010**

Perum Perumnas Regional V Solo, memutuskan kontrak kerja sama pengembangan Perumahan GLA di Jeruksawit, Gondangrejo, menyusul kegagalan KSU Sejahtera memenuhi kewajibannya membayarkan *equity sharing*.

● **26 Januari 2010**

Pimpinan DPRD Karanganyar menggelar rapat koordinasi antarfraksi terkait polemik proyek perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Jeruksawit, Gondangrejo.

● **8 Februari 2010**

Kasus GLA diambil alih Kejaksaan Tinggi (Kejakti).

● **15 Februari 2010**

Pimpinan KSU Sejahtera, Handoko Mulyono, ditetapkan sebagai tersangka.

● **17 Maret 2010**

Toni Haryono diperiksa penyidik Kejakti Jateng selama delapan jam sebagai saksi atas tersangka Handoko Mulyono.

● **26 April 2010**

Toni Haryono ditahan Kejakti Jateng.

● **16 Mei 2010**

Mantan Ketua KSU Sejahtera, Karanganyar tahun 2007, Fransiska Riana Sari ditetapkan sebagai tersangka.

● **7 Juni 2010**

Penyidik telah merampungkan BAP tersangka Handoko Mulyono dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar.

## 7 Parpol ..... sambungan dari Hal 1

Terpisah, Ketua DPD PKS Karanganyar, Sri Hartono mengatakan, pihaknya memang mendapatkan dana untuk kemenangan Rina Iriani SR sebagai Bupati Karanganyar. "Sangat aneh bila kami sebagai salah satu tim pemenang, sama sekali tidak menerima dana kemenangan," ungkapnya. Namun, Sri sama sekali tidak mengetahui dari kantong mana sumber dana itu didapat. "Seandainya kami tahu itu diambilkan dari GLA, tentu tidak kami terima," ucap Sri Hartono. Jika memang demikian, dia mengaku masih menunggu keterangan yang jelas dan bukti yang konkret dari Kejakti Jateng, terkait dengan PKS yang mendapatkan kucuran dana dari GLA. Namun, lanjut Sri, pihaknya tidak percaya begitu saja jika dana kampanye hanya bersumber dari kantong GLA.

Sedangkan Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar, Paryono, juga mengaku tidak tahu menahu soal tudingan aliran dana proyek GLA ke partai yang dipimpinnya. "Saya tidak tahu. Saya tak punya kasus GLA juga setelah mencuat belakangan ini," ujarnya.

Disinggung soal penggunaan dana itu yang diduga untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2008, Wakil Bupati Karanganyar ini menegaskan tidak ada keterkaitan antara dana Pilkada dan KSU Sejahtera maupun proyek GLA. Kalau pun ada dana dari dirinya dan Rina Iriani SR, Ratnaningsih kepada tim sukses dan partai pengusung, menurutnya adalah hal yang wajar karena se-

bagai calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup).

Namun demikian Paryono meminta agar persoalan tersebut diklarifikasi kepada Ketua DPC PDI Perjuangan yang lama, Sumanto. Tetapi ketika dihubungi hingga pukul 21.30 WIB, tidak ada jawaban dari telepon genggam milik Sumanto yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPRD Karanganyar.

Sementara itu Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romdloni, menolak berkomentar terkait tuduhan yang dialamatkan ke partainya. "Untuk sementara saya tidak mau berkomentar dulu. Nanti setelah ada perkembangan kami akan bicara." Romdloni yang juga anggota DPRD Karanganyar ini tidak membantah dan juga tidak membenarkan ketika ditanya apakah PPP turut menikmati aliran dana dari proyek GLA yang kini bermasalah.

### Tidak tahu

Ketua DPC Partai Demokrat Karanganyar, Rinto Subekti, menyampaikan tidak mengetahui secara pasti jika dana GLA itu mengalir ke Parpol yang dipimpinnya. "Kalau disebutkan dana GLA mengalir ke Demokrat, kami tidak tahu. Tapi memang, secara pribadi Pak Toni (Suami Bupati Rina-red) punya utang kepada partai kami." Saat ditanya berapa nilai utang dan kapan utang itu dilakukan, Rinto mengaku lupa. "Nah, itu yang mungkin nanti akan kami bicarakan bersama. Sekarang saya masih

di luar kota. Saya lupa berapa nilai utangnya dan kapan Toni berutang, tapi yang jelas sampai sekarang belum lunas," tutur Rinto.

Ketua DPC PKB, Mugiharjo mengakui saat pencalonan Bupati Karanganyar, PKB memang merapatkan barisan mendukung Rina Iriani SR, maju sebagai Bupati. "Kami memang mendapatkan bantuan untuk konsolidasi tim. Bukan hanya kami, tapi partai pendukung lain juga," ungkapnya saat dihubungi *Espos*. Dana tersebut antara lain untuk biaya kampanye.

Waktu itu, pihaknya sama sekali tidak mengetahui dari mana sumber dana konsolidasi tersebut. Jika memang itu dari dana GLA, terang Mugiharjo, pihaknya juga tidak mengetahui.

Mugiharjo tidak menyebut berapa besaran bantuan untuk konsolidasi tersebut. Hanya, besaran bantuan yang diterima antara satu partai dengan yang lain, berbeda-beda. Seperti halnya kata Mugiharjo, perbedaan itu berdasarkan kursi atau konstituen dari masing-masing partai pendukung.

Pada bagian lain, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Karanganyar, Joko Indarto hingga pukul 21.30 WIB tidak dapat dihubungi guna dimintai konfirmasi soal tudingan aliran dana GLA yang juga diarahkan ke partainya. Ketika dihubungi *Espos*, nomor telepon genggam yang bersangkutan tidak aktif. Begitu pula dari Partai Pelopor, nomor telepon Bambang Hermawan tidak bisa dihubungi hingga Senin malam. □

try/haw/m87/oto

KP2KKN soal kasus dugaan korupsi GLA:

# Periksa Bupati Rina!



**TERSINGKIR**—Pemain Prancis Franck Ribery (kiri) bersalaman dengan wasit Oscar Ruiz sementara pemain Afrika Selatan berjalan meninggalkan lapangan usai laga penyisihan Grup A di Stadion Free State, Bloemfontein, Afsel, Selasa (22/6).

JIBU/Bisnis Indonesia/AP Photo/Thamba Hadebe

## Karanganyar (Espos)

Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejakti) segera memeriksa Bupati Karanganyar Rina Iriani terkait kasus dugaan korupsi dana pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA).

● Oleh: Triyono, Insetyonoto, Tika SA

Dana GLA ini diduga mengalir ke sejumlah Parpol yang mengusung Rina-Paryono dalam Pilkada Karanganyar 2008 silam. Sementara itu Rina Iriani mengaku tak tahu menahu soal aliran dana ke tujuh Parpol yang mengusung dirinya di Pilkada.

"Pengkakuan pengurus Parpol pengusung Bupati Rina pada Pilkada Karanganyar 2008 merupakan bukti awal yang kuat bagi penyidik Kejakti memeriksa Rina," kata Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto kepada *Espos*, Selasa (22/6).

Menurut dia, boleh saja Rina membantah tak pernah memberikan uang kepada Parpol, tapi Kejakti jangan mudah percaya dan harus memeriksa Rina untuk membuktikan kebenarannya. "Jaksa harus membuktikan ada tidaknya keterlibatan Bupati Rina dalam kasus korupsi GLA dengan memeriksa yang bersangkutan," pungkas Eko.

Seperti diketahui kalangan Parpol pengusung Rina-Paryono, masing-masing Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Pelopor dalam keterangan kepada penyidik Kejakti mengaku telah menerima dana telah menerima aliran dana dari pasangan Rina Iriani-Paryono pada Pilkada 2008 silam.

## Afrika Selatan dan Prancis tersingkir

### Bloemfontein (Espos)

Perjuangan gigih tuan rumah Afrika Selatan (Afsel) yang memenangi duel krusial melawan Prancis dengan skor 2-1 di Stadion Free State, Selasa (22/6), ternyata belum cukup untuk mengantar Bafana Bafana terkualifikasi dari Grup A Piala Dunia 2010.

Steven Pienaar dkk harus menerima kenyataan hanya berada di posisi ketiga klasemen akhir grup, kendati di partai lain Uruguay berhasil membenamkan Meksiko dengan skor 1-0. Uruguay akhirnya tampil menjadi juara Grup A dengan nilai tujuh, dan akan berhadapan dengan runner up Grup B di Port Elizabeth pada babak 16 Besar.

Sedangkan El Tri Meksiko menjadi runner up Grup B dengan nilai empat, atau sama dengan nilai Afsel tetapi Giovanni Dos Santos es unggul selisih gol. Meksiko punya produktivitas gol +1, sedangkan Afsel hanya punya produktivitas gol -2.

Di babak 16 Besar, Meksiko akan bertemu dengan juara Grup B di Stadion Soccer City, Johannesburg. Nasib tragis dialami Tim Ayam Jantan Prancis yang harus terpuruk menjadi juru kunci Grup A dengan nilai satu.



memuji penampilan anak asuhnya. "Saya bangga kepada anak-anak (para pemain). Mereka membuat negara ini bangga. Mereka membuktikan mampu membuat kemajuan," ujar pelatih asal Brazil itu.

Sedangkan pelatih Prancis, Raymond Domenech, tak bisa menyembunyikan kesedihannya. "Seperti orang pada umumnya, kami sedih dan kecewa melihat hasil dari apa yang saya harapkan dari tim, hati mereka, kebersamaan dan kemurahan hati mereka."

Namun Domenech enggan berkomentar lebih jauh soal timnya. "Ini bukan waktu yang tepat untuk menganalisis apa yang telah terjadi. Tim ini sebenarnya potensial. Ada saat-saat yang luar biasa dan masih akan ada lagi. Tim Prancis tidak akan pernah mati, mereka akan maju terus."

### Kartu merah

Bermain di hadapan 39.415 penonton, kedua gol Afsel dicetak oleh Bongani Khumalo menit ke-20 dan Katlego Mphela menit ke-37, sedangkan gol balasan Prancis diciptakan gelandang asal klub Chelsea, Florent Malouda, menit ke-70.

Pada pertandingan kemarin, Prancis yang sebelumnya diterpa isu perpecahan juga harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-25, setelah gelandang Yoann Gourcuff diganjar kartu merah oleh wasit Oscar Ruiz asal Kolombia.

Pelatih Afsel, Carlos Alberto Parreira,

Bersambung ke Hal 7 Kol 4

Bersambung ke Hal 7 Kol 1

## Periksa Bupati

sambungan dari Hal 1

Secara terpisah, Bupati Karanganyar berkelit terkait aliran dana ke tujuh Parpol berbeda dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2008. Dia mengatakan dana kampanye diberikan oleh Rina Center.

"Soal aliran dana (ke Parpol) itu bukan urusan saya, saya tidak tahu. Sebagai Calon Bupati (Cabup) saya tidak boleh seperti itu," ujarnya ditemui *Espos* sesuai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan di Pendapa Rumah Dinas (Rumdin) Bupati di Jl Lawu, Selasa (22/6).

Pengakuan Rina tersebut bertolak belakang dengan penjelasan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Karanganyar, Sumantho. Sumantho yang juga Ketua DPRD Karanganyar menegaskan partainya mendapatkan dana kampanye secara langsung dari Rina sebagai Cabup saat itu. Bantuan diberikan dalam beberapa tahap dengan jumlah nominal keseluruhan mencapai Rp 400 juta.

Bupati juga membantah dirinya memiliki keterkaitan dengan Rina Center sebagai tim sukses dalam Pilkada 2008 di Kabupaten Karanganyar. Rina menyatakan diusung oleh Parpol-parpol dengan janji dan komitmen akan menjadi kepala daerah yang baik selama menjabat sebagai bupati setempat. "Lagipula bukan Rina Center, tetapi Rino (Rina-Paryono)," katanya seraya berlalu.

Di sisi lain, Ketua Rina Center, Bambang Hermawan, mengaku tidak pernah mengetahui adanya aliran dana dari lembaga yang dipimpinnya itu kepada partai pengusung dan pendukung Rina Iriani-Paryono dalam Pilkada 2008.

Jika pun ada, tegas dia, seharusnya ada bukti-bukti hitam di atas putih.

"Saya tidak bisa bilang ada atau tidak. Kalau saya sendiri yang pasti tidak pernah memberikan. Saya juga tidak pernah mengelolakeuangan. Kalau melalui orang lain, ya tidak tahu. Tetapi seharusnya ada bukti-bukti hitam di atas putih, entah itu kuitansi atau lainnya, ternyata tidak ada," tandasnya.

Dalam kesempatan serupa Bambang yang juga Ketua DPC Partai Pelopor Karanganyar membantah aliran dana ke partainya dalam rangka mendukung pasangan Cabup- Calon Wakil Bupati (Cawabup) Rina-Paryono. Meski mengaku sebagai juru kampanye (Jurkam) Bupati terpilih, dia menyatakan kelembagaan Partai Pelopor tidak pernah mendukung pasangan calon tertentu.

Pada bagian lain, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romdloni, mengakui menerima dana terkait Pilkada 2008 senilai Rp 100 juta lebih. Uang tersebut diberikan suami Bupati Rina Iriani, Toni Haryono, setelah bersedia dijadikan Cabup dalam Pilkada tersebut. Dana diserahkan beberapa kali dan dihabiskan untuk pembiayaan kampanye pencalonan.

"Saya menerima sebagai pribadi, tidak ada kaitannya dengan partai. Tetapi kami tidak tahu itu duit dari proyek GLA. Jika tahu, tentu tidak akan diterima," serunya ditemui di Sekretariat DPC PPP Karanganyar, kemarin. Romdloni yang juga anggota Komisi I DPRD Karanganyar menyatakan sanggup mengembalikan uang yang diterima jika dikemudian hari terbukti dari GLA.

Namun demikian dari total nomi-

nal Rp 100 juta lebih, dia menegaskan hanya berkesanggupan untuk mengembalikan Rp 50 juta di antaranya. Politisi senior di Karanganyar itu berdalih Rp 50 juta lainnya yang diberikan untuk dirinya merupakan kompensasi gaji setelah nonaktif dari keanggotaan di DPRD periode 2004-2009. Romdloni mengaku sempat nonaktif sekitar tujuh bulan setelah dicalonkan oleh Toni Haryono sebagai pasangan Cabup-Cawabup bersama Silo Hadi Rahtomo ST.

"Waktu itu saya dicalonkan Toni Haryono agar Pilkada berjalan sesuai tahapan. Saya sadar hanya menjadi calon boneka, semua persyaratan pun sudah ada yang mengurus. Kalau kemudian muncul kasus semacam ini, saya merasa sangat dirugikan, nama baik menjadi tercemar. Karena itu tidak menutup kemungkinan akan ada langkah hukum terkait kasus ini."

Mengomentari kasus dugaan korupsi GLA, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa menuding kesalahan manajemen pengelola menjadi penyebabnya.

Pengelolaan pembangunan perumahan tersebut seharusnya bukan diserahkan pada lembaga semacam koperasi, namun lebih tepat ditangani bank komersial. Suharso mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi di jajaran internal Kementerian Perumahan Rakyat terkait kasus GLA. Dia menegaskan, tidak ada kesalahan penanganan di jajaran staf kementerian. Peluang munculnya kesalahan muncul saat manajemen pengelolaan diserahkan pada lembaga yang tidak tepat. □



**PUTRI SOLO**—Juara pertama pemilihan Putra Putri Solo 2010 yakni Hanifah Fuad, Fatmali Mutin dan Rachel Georgeha mengangkat piala saat malam final di kawasan Ngarsopuro, Solo, Kamis (29/7) malam. Malam tadi Putri Indonesia Pariwisata, Isti Ayu Pratiwi serta duta wisata dari sejumlah daerah

## Hanifah-Rachel, Putra-Putri Solo 2010

malam, menjadi momen yang istimewa bagi 20 finalis PPS 2010 karena itu merupakan puncak Pemilihan Putra Putri Indonesia Pariwisata. Berikut laporan wartawan SOLO-SUMI Handayani, mengenai pertandingan tersebut.

langsung oleh Putra-Putri Solo 2010, Sugo Wahyu Raharjo dan Selvie Ananda.

Piala bergilir diserahkan langsung oleh Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo didampingi Sekretaris Daerah Kota Solo, Dwi Budi Hartono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Purnomo Subagyo dan Putri Indonesia Pariwisata 2009, Isti Ayu Pratiwi.

3.000 penonton yang menadati Pameran Wundu Jenar, Ngarsopuro menjadi saksi penobatan Putri Putri Solo 2010, Kamis (29/7) malam. EM perwakilan dari Keayahan dan Rachel Georgeha di Banjarsari dinobatkan sebagai Putri Putri Solo 2010. Mereka adalah tawar Putri Putri Solo 2010 dan tawar yang diserahkan

**Bersambung ke Hal 9 Kol 1**

**esia**  
**GANAS**  
Gratis Nasional

LOKAL INTERNASIONAL 22 JAM HUBUNG

**SEKARANG**  
**CUMA ISI ULANG**  
1000

bisa langsung  
**GANAS.**

# Kasus Griya Lawu Asri JPU: Rina terima Rp 18,6 M

**Karanganyar (Espos)**

Bupati Rina Iriani SR dan suaminya, Tony Iwan Haryono disebut menerima aliran dana proyek pembangunan dan pemugaran perumahan bersubsidi 2007 dan 2008 di Karanganyar senilai Rp 18,6 miliar lebih.

● Oleh: Triyono

Fakta ini diungkapkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek perumahan bersubsidi dengan terdakwa Ketua Koprasri serta Usaba (KSU) Sejahtera Handoko Mulyono di Pengadilan Negeri Karanganyar, Kamis (29/7).

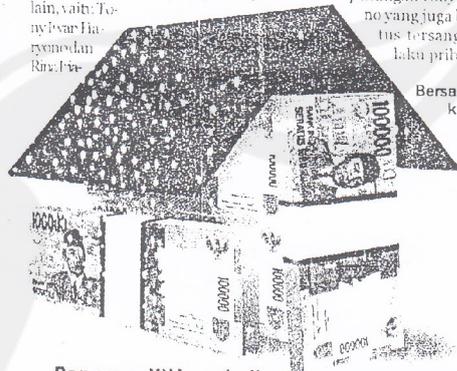
Dalam persidangnya, JPU menyatakan dari total uang yang diduga diterima Rina dan Tony, dana senilai Rp 11,1 miliar lebih dimanfaatkan secara bersama-sama.

Perbuatan terdakwa (Handoko Mulyono-rev) telah memperkaya diri sendiri sebesar lebih kurang Rp 3,7 miliar dan memperkaya orang lain, yaitu Tony Iwan Haryono dan Rina Iriani.

Tim Sri Ratnaningsih SPd Mhamu sebesar lebih kurang Rp 18.671.339.532, ungkap anggota tim JPU, Sukarman SH, ketika membacakan surat dakwaan untuk Handoko Mulyono.

Menurut pemaparan tim JPU, dari dana subsidi kegiatan pembangunan dan pemugaran rumah tahun 2007 dan 2008 di Kabupaten Karanganyar, Rp 11,13 miliar digunakan Rina dan suami secara bersama-sama.

Selain itu JPU juga menyangkan pemanfaatan uang senilai Rp 3,041 miliar lebih guna kepentingan Tony Haryono yang juga berstatus tersangka selaku pribadi.



**Bersambung ke Hal 9 Kol 4**

### Paparan JPU soal aliran dana pembangunan rumah bersubsidi 2007 dan 2008

Total dana subsidi Kemperpara  
Rp 28.817.294.000.

- Aliran dana**
- Rina-Iwan terima aliran dana Rp 18.671.339.532
  - Rp 11,13 miliar dimanfaatkan bersama-sama
  - Rp 370 juta dikantongi Handoko Mulyono
  - Rp 3,041 miliar lebih dikantongi Tony selaku pribadi
  - Rp 7.266.800.000 dipakai sesuai penuntukan
  - Pembangunan 111 unit rumah Rp 1.312.500.000
  - Bantuan subsidi KPR Sejahtera bersubsidi perbaiki rumah 1.551 unit Rp 1.974.300.000

- Perincian Aliran Dana**
- Subsidi pembangunan rumah 561 unit Rp 1.312.500.000
  - Subsidi pemugaran 1.397 rumah Rp 8.873.000.000
  - Dana subsidi perumahan tahun 2007 yang belum dimanfaatkan ketua KSU Sejahtera setelah Handoko Mulyono, Fransiska Riana Sari Rp 6.914.000.000

Grafis: Luthmans

Sumber: Dakwaan JPU 1/10

tegur Kapolri adar berielas rekeninri mendit

serta gagangnya pecan itu menunjukkan bahwa pistol dari tipe Standard Longhorn itu adalah jata yang digunakan untuk membak Sharon Tate dan temannya dalam pembantaian di

ty Seneri jodin awu bernasu menariki kesimpulan bahwa ketiga pembunuhan itu terkait. **□ Bersambung**

Dari berbagai sumber

pengundang penyakit berbahaya lainnya seperti jantung, ginjal, hipertensi, impotensi dan lainnya. Urahim sudah mencoba mengatasinya lewat rumah sakit, dokter dan

juga mengandung fiber dan magnesium yang mampu mencegah diabetes. Selain itu Gentong Mas memiliki indeks glikemik yang sangat rendah yaitu hanya 35, sehingga

085229633708. Magelang: 081-215688284. Salatiga: 08282818509. Adv Depkes: P-IRT 612.3205.01.114 www.gentongmas.com

sambungan dari Hal 1

Salah seorang pengunjung siswa kelas XI, SMAN 4 Solo yang ditemui usai acara menyayangkan hal itu. "Seharusnya finalis juga menjawab pertanyaan menggunakan Bahasa Jawa."

Pada Kamis siang, Putri Indonesia Pariwisata Istimia Ayu Pratiwi, bersilaturahmi ke kantor redaksi Harian Umum SOLOPOS. Rombongan bertemu dengan Pemimpin Perusahaan Solopos, Bambang Nur Rahadi; Manager Sirkulasi dan Humas PT Aksara Solopos, Amir Tohari; Redaktur Pelaksana, Anton W Prikartono; Redaktur Pergelaran, Astrid Prihatini WD dan redaktur lainnya serta karyawan dari bagian promosi. Dalam kesempatan itu, Ayu menuturkan tugasnya sebagai Putri Indonesia Pariwisata meng-



Putri Indonesia Pariwisata 2010 Ayu Pratiwi

haruskannya mengunjungi berbagai daerah di Indonesia. **□**

sambungan dari Hal 1

gendut itu. Sementara itu, Kapolri tidak bersedia berkomentar tentang pertemuan dengan Presiden tersebut. Ketika ditemui setelah Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis malam, Kapolri tidak bersedia diwawancarai dan segera bergegas meninggalkan wartawan. **□ Ant/dtc**

curi karena ingin menebus resor anaknya yang terkapar di rumah sakit. Inilah "hukuman" yang harus diterima pencuri sepeda, berbeda dengan pencuri yang hasil curiannya ribuan kali lebih besar. Pencuri jenis ini untuk memperkaya diri—mendapatkan perlakuan yang berbeda. Logika paling mudah mengatakan, ia akan menerima hukuman ratusan kali lebih berat dari pencuri sepeda. Tapi anehnya, tak satu pun dari kita menyebutnya "pencuri" apalagi "maling". Apa beda kedua pencuri ini? **□**

Mungkin banyak manusia yang lupa, bahwa Allah Yang Maha Adil akan menghakimi satu per satu manusia. "Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?" (QS 95: 8). **□**

Muhsin Al Jufri

Salah seorang pendiri Forum

Silaturahmi Minggu Legi

(Fosmil) Solo

JPU: Rina

Seperti pula dikemukakan tim JPU, uang yang dikelola terdakwa Handoko Mulyono dalam kegiatan pembangunan dan perumahan bersubsidi tahun 2007 dan 2008 secara keseluruhan senilai Rp 26.917.299.360. Dari nominal subsidi Kementerian Negara Perumahan Rakyat itu, diketahui hanya sekitar Rp 7.236.800.000 yang digunakan sesuai peruntukan.

Terdakwa Handoko Mulyono, secara tegas menyatakan dia hanya menjadi korban dalam perkara yang juga menyeret Tony Haryono dan Ketua KSU Sejahtera 2007, Fransiska Riana Sari, sebagai tersangka. Handoko terang-terangan menuding Rina dan Tony sebagai aktor intelektual.

Soal keterlibatan Bu Rina dan Pak Tony banyak saksi. Pemakaian terutama untuk Pilkada (pemilihan kepala daerah 2008-red). Pribadi juga ada, untuk sekolah dokter, misalnya," jelas Handoko kepada wartawan usai sidang.

Secara terpisah, hingga pukul 22.00 WIB Bupati Rina Iriani tidak dapat diminta konfirmasi perihal aliran dana seperti yang diungkapkan tim JPU. Sudah berulang kali *Espos* mencoba menghubungi, sempat diterima oleh ajalannya yang mengaku bernama Arif. "Bupati sedang tidak bisa diganggu," kata Arif seraya menambahkan bahwa Rina tengah berada di Jakarta untuk suatu kepentingan.

Sebelumnya, Bupati Rina pernah menegaskan dirinya tidak tahu mengenai kasus dana proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Astri (GLA) di Jeruksavit.

Meski kasus itu telah menyeret suaminya, Toni Haryono sebagai tersangka, namun Rina mengaku tidak mengetahui secara detail dan rinci mengenai kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang diurus Kejaksaan Tinggi (Kejakati) Jateng.

Kriiinggg...

Cempluk dan Koplo memang sudah tiga tahunan tidak pernah ketemu. Sejak mantan kekasihnya itu menkalit. Maka begitu mereka beradu pandang, s-s-l-erla makan Cempluk pun *sima sakmalika*. Mau nggak menyapa kol, kelihat-an wagu, kalau menyapa kok malah *ya wagu*. Cempluk jadi salah tingkah. Akhirnya ia pun basa-basi menyapa sambil menyalami keduanya. "Hai, apa kabar?"

"Alhamdulillah, kabar baik," jawab Koplo.

"Mas, Mbak, *disekecakke lho* ya," basa-basi Cempluk sambil melangkah menuju mejanya lagi.

Dalam benaknya, alasan apalah ja-

"Bedakan, itu permasalahan suami saya. Dan saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan GLA maupun Koperasi Serba Usaha (KSU)," jelasnya. Dia mengaku, dirinya tidak mengetahui selek beluk pelaksanaan proyek pembangunan perumahan GLA. (*SOLOPOS*, 20/6)

Pada bagian lain Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saman, mengaskar perlunya Kejaksaan Tinggi (Kejakati) Jateng segera meminta izin guna pemeriksaan Bupati Rina Iriani dalam kasus itu.

Sidang Handoko

Sementara itu Handoko Mulyono terancam pidana penjara 20 tahun. Ketua KSU Sejahtera itu dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Bahwa terdakwa sebagai Ketua KSU Sejahtera, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," ungkap koordinator tim JPU perkara itu, Istiyas Jodi SH, dalam dakwaan primernya, kemarin.

JPU menuntaskan kasus Rp 26,9 miliar yang dikelola terdakwa bersama tersangka Tony beresalasan memperoleh dengan penerima subsidi pembangunan rumah Rp 26,9 miliar. Dana subsidi perumahan tahun 2007 yang belum dimanfaatkan Ketua KSU Sejahtera sebelum Handoko Mulyono, Fransiska Riana Sari.

Dalam praktiknya, rombongan anggota tim JPU, Sukarman SH, dari dana bantuan subsidi yang tidak dimanfaatkan, sebagian besar tak hemat-hem sesuai dengan peruntukannya. Dan menyebab-

kan, dari Rp 26,917 miliar lebih yang dialokasikan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dalam dua proyek berbeda itu, hanya sekitar Rp 7,236,800,000 saja yang betul-betul dimanfaatkan untuk realisasi kegiatan.

Perinciannya, kata dia, untuk bantuan subsidi KPR (kredit kepemilikan rumah) program pembangunan rumah sebanyak 111 unit senilai Rp 1,312,500,000. Selain itu untuk bantuan subsidi KPR Sederhana bersubsidi perbaikan rumah sebanyak 1,551 unit, Rp 5,974,300,000.

"Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," ujarnya menegaskan.

Sementara dalam dakwaan subsidi-dernya, JPU mengemukakan terdakwa melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan itu adalah tindak pidana seperti diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31, 1999, sebagaimana diubah dan ditambah di UU No 20, 2001.

Terikat dakwaan itu, terdakwa melalui penasihat hukumnya, Yuri Warman SH, didampingi Hilda Damirin SH, Hastin DSH, menyatakan pihaknya akan mengajukan eksepsi atau eksepsi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, RE Setiawan SH, selanjutnya akan diaksakan kembali. Kamis, 5/9, dipanggang akan mendengarkan eksepsi tersebut. **□**

sambungan dari Hal 1

supaya bisa cepat pergi dan waringin? tiba-tiba mak JPU, atau wa de-cemertang HP di dalam tasnya langsung diambin! seolah-olah ada telepon. Cuma sayang HP-nya lupa di simat. Dengan gaya kumayunya, ia ngobrol sekejrat kwat HP-nya, padahal sebenarnya Cempluk memang omong di awal.

Sambil menepelkan HP di telinga, Cempluk iak, nyamperin Koplo dan Nicole untuk amitan. Sejalan di jalan Mas Mbak Biku-buru, mau ke kantor nih.

"Mangga, mangga," sahut mereka.

Dengan langkah dibikin agak teburu-beru, Cempluk menuju ke kamar sambal. Untuk melanjutkan obrolan kumayu di-

taannya. Tiba-tiba tanpa diduga dan diayata, HP Cempluk yang sedang dipakai untuk *action* itu berderang keras banget tepat di depan Mas Kasir yang letaknya tak jauh dari tempat duduk Koplo.

*Goduuuuurakkk!* Serasa dunia mau kama! Seketika itu pula wajah Cempluk memerah seperti udang rebus. Malu nggak karuan, karena Koplo dan Nicole ternyata memandangnya sambil tersenyum nganyauke. Dengan buru-buru Cempluk menuju mobil dan lancap gas dengan sejujra kedongkolan. **□ Kiriman Sri Hartono, Perum Pondok RT 9/RW IV Tohudan, Colomadu, Karanganyar**

ika-  
tjen  
rena  
irek-  
nber  
Kar-  
nya-  
a so-  
erse-  
a Ga-  
rang  
arah-  
ukum  
in ko-  
an ke-  
sidan-  
tegas-  
lai ter-  
tumas  
di Ma-

**Tanggapan Parpol terhadap dana GLA**



**PKS**  
Bendahara OPW PKS Jateng, Lisiyo Nugroho :  
Dana yang diterima DPD PKS Karanganyar dari calon bupati pada Pilkada 2008 tak mencapai Rp 1,2 miliar.



**Partai Demokrat**  
Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Karanganyar, Tri Haryadi :

"Jujur saja memang ada, tetapi jumlah persennya berapa saya lupa. Kami juga tidak tahu sumbernya dari mana. Kalau ke hudson ada kabar seperti itu dibongkar."



**PDI Perjuangan**  
Sekretaris DPC PDIP Karanganyar, Sumanto:  
Mencaya pembiayaan operasional kampanye pembiayaan, namun PDI memang tidak memverifikasi asal-usul sumber dana yang diberikan Rina Irani sebagai Cabup secara langsung."



**PKS**  
Ketua DPC PKS, Mughtharjo :  
"Kami memang mendapatkan bantuan untuk konsolidasi tim. Bukan hanya kami, tapi partai pendukung lain juga."

Kasus korupsi GLA

# Jaksa segera periksa Bupati Rina

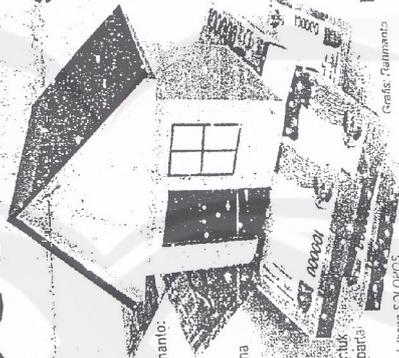
Semarang (Espos)

Bupati Karanganyar Rina Irani Sri Ratnaningsih segera diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jawa Tengah setelah namanya disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) ikut menikmati aliran dana pembangunan perumahan Griya Lawu Asri (GLA).

Oleh: Insetyonoto, Triyono

Sementara Bupati Rina melalui pe-nasihat hukumnya membuat se-mua yang ditungkapkan JPU di pe-si-dangan Handoko Mulyono Kamis (29/7) lalu. "Kami akan menindaklanjuti de-

Bersambung ke Hal 6 Kol 1

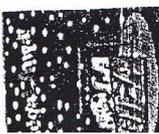


Sumber: Litbang SDI OP-OS  
Gratis: Rainnanta



Dana gempap Klaten  
Rn 1.8 T diduga dikorupsi

Beli gas 3 kg



Pendataan ini, lanjut Asih, harus dilakukan. Pemkot maupun konsultan tidak mungkin menggunakan data konversi. "Karena, saya pastikan

ngatakan Hiswana Migas siap melakukan pemetaan dan penataan ulang terhadap pangkalan resmi elpiji 3 kg. Dari Jakarta, PT Pertamina (Per-

rupa masukan dari P1 Pertamina (persero) untuk mengatasi masalah disparitas harga dengan elpiji 3 kg. □ [haw/dtc/JIBI/BisnisIndonesia](http://haw/dtc/JIBI/BisnisIndonesia)

per  
ris ne  
cat k

W  
yo B  
cari  
tifny

itu u

Pr

pilih

keke

bisa:

tuk r

ki be

yo be

rena

Na

anny

ya su

terba

buhu

ra si

saya

Se

tali ti

ru be

kaha

nya

De

druk

Sigr

dian

terse

teng

cul. F

wha.

"Ja  
mula  
Saat

## Jaksa segera

Siapa pun yang terkait dengan kasus korupsi GLA, sambungnya, akan ditindak secara hukum, termasuk Rina harus mempertanggungjawabkan bila memang diduga terlibat. Untuk itu, lanjut Salman pihaknya secepatnya akan memproses perizinan pemeriksaan Bupati Karanganyar kepada Presiden.

Pasalnya sesuai ketentuan untuk memeriksa pejabat kepala daerah (bupati, gubernur) harus mendapatkan surat izin Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)). "Surat izin pemeriksaan Rina kepada Presiden segera diproses," ujarnya tanpa menyebutkan waktu kapan akan mengirim surat izin itu ke presiden.

Menurut Salman pemeriksaan terhadap Bupati Karanganyar, tak perlu harus menunggu rampungnya proses persidangan terdakwa Handoko Mulyono di Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar. "Tak perlu harus menunggu vonis Handoko, pemeriksaan terhadap Rina bisa dilakukan," tandasnya.

Salman menegaskan, pihaknya akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana bantuan pembangunan perumahan bersubsidi GLA dan renovasi perumahan di Karanganyar dari Kementerian Negeri Perumahan Rakyat tersebut. "Semua pihak yang terlibat dalam kasus GLA akan ditindak sesuai

ketentuan berlaku," tukasnya.

Sementara itu Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih secara tegas membantah ikut menikmati aliran dana subsidi proyek pembangunan dan pemugaran runah tahun 2007 dan 2008 dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemcnegera) RI.

Bantahan tersebut disampaikan penasihat hukum Rina Iriani SR, Rudy Alfonso SH, melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar Nuanung Susanto. Rudi menyatakan keberadaan Rina sebagai istri tersangka Tony Iwan Haryono tidak serta merta bisa dimintai pertanggungjawaban perbuatan pidana yang disangkakan kepada suaminya itu.

"Tidak benar bahwa Ibu Rina menerima atau pun menikmati aliran dana dari KSU Sejahtera sebagaimana diberitakan di media," ungkap Rudy seperti dikemukakan Nunung di Kantor Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar, Jumat.

Rudy menyatakan, terkait materi surat dakwaan tim JPU kasus dugaan korupsi proyek perumahan bersubsidi dengan tersangka Handoko Mulyono yang mengait-kaitkan dengan Rina Iriani, hal itu memerlukan pembuktian dalam proses persidangan. Dia menegaskan, tidak ada kaitan dan ti-

sambungan dari Hal 1

dak pernah sama sekali Rina Iriani berurusan dengan KSU Sejahtera.

Masih dalam persoalan serupa, Rudy menegaskan pihaknya menghormati proses dan supremasi hukum yang diterapkan kepada semua warga negara demi keadilan. Namun menurutnya, hal itu tidak boleh didasari oleh adanya unsur fitnah. Hal itu berkaitan dengan apa yang disampaikan tim JPU kasus dugaan korupsi perumahan bersubsidi dengan tersangka Handoko Mulyono, bahwa Bupati Rina Iriani dan suaminya, Tony Iwan Haryono, disebutkan ikut menerima aliran dana subsidi senilai Rp 18,6 miliar.

Pada bagian lain, terkait adanya pernyataan tim JPU yang dipimpin Istyas Joni SH, tim penasihat hukum akan lebih dulu melakukan kajian terhadap persangkaan jaksa kasus dugaan korupsi atas nama Handoko Mulyono yang juga Ketua KSU Sejahtera. Sementara itu sampai Jumat (30/7) sore, Bupati Rina belum bisa dimintai konfirmasi secara langsung oleh wartawan terkait materi dakwaan tim JPU. Pertemuan Rina dengan wartawan yang semula dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB, dan sempat ditunda selama satu jam sampai pukul 14.00 WIB akhirnya dibatalkan atas permintaan Rina Iriani sendiri. □

**SOLOPOS, 1 Agustus 2010**  
**(judul:**  
**Rina: Jangan Politisasi)**

**Rina. Jangan Politisasi**

1 Agustus



**PERIKSA PABRIK TABUNG**—Anggota polisi berpakaian preman dari Polres Sukoharjo memeriksa ribuan tabung gas ukuran 3 kg yang semula diduga diproduksi tanpa izin di pabrik tabung gas PT Windika Indo Niaga di Grogol, Sukoharjo, Sabtu (31/7). Dalam pemeriksaan itu tak ditemukan penyimpangan. Polisi terus menggelar operasi terkait meledaknya tabung gas 3 kg.

**Tim gabungan gelar operasi tabung gas**

**Sukoharjo (Espos)**  
 Aparat gabungan Polres Sukoharjo bersama jajaran Disperindag Sukoharjo mulai menggelar operasi kelangkaan proses produksi tabung elpiji. Hal ini dilakukan terkait dengan banyaknya kasus ledakan tabung gas. Sebuah tempat produksi tabung elpiji di Grogol, Sukoharjo, Sabtu (31/7) petang, menjadi sasarannya. Sebelumnya, sempat beredar in-

formasi yang mencurigai adanya praktek pembuatan tabung tak berizin di wilayah Sukoharjo. Aparat gabungan mendarat lokasi yang terletak tak jauh dari Jl Brigjend Sudarto sekitar pukul 18.00 WIB. Petugas langsung memeriksa proses perizinan pabrik yang berada di bawah payung PT Windika Indo Niaga itu. Namun mereka tidak menemukan penyimpangan apapun dalam proses perizinan maupun pro-

ses produksi tabung. "Semula ada yang mencurigai bahwa tempat ini memproduksi tabung gas tanpa izin. Namun setelah kami periksa mereka mengatakan punya izin, namun yang kami terima baru foto kopinya," kata Kasatreskrim Sukoharjo AKP Sukiyono yang memimpin operasi tersebut mewakili Kapolres Sukoharjo AKBP Suharyono.

Bersambung ke Hal 8 Kol 1

**Solo (Espos)**

Bupati Karanganyar Rina Iri Ratnaningsih, Sabtu (31/7), mengatakan siap diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng terkait dugaan korupsi aliran dana kasus penggunaan perumahan Griya Lavri (GLA). Rina juga meminta GLA tak dipolitisasi.

● Oleh: Indah Septiyaning W, Oriza V

Sebelumnya nama Rina disebut Jaksa P Umum (JPU) ikut meniknati aliran dana perumahan subsidi di daerah Jovit, Karanganyar. Ketika ditemui *Espos* menyampaikan sambutan perwakilan wali dalam acara *Open House* di SD Al Firdaus Setu, Rina menyatakan sebagai warga negara taat hukum dirinya siap memenuhi panggilan. Ketika ditanya apakah Rina terlibat kasus GLA, Rina menyerahkan semuanya tim kuasa hukum. Rina meminta dalam penanganan pengusutan kasus GLA tidak ada unsur maupun fitnah.



Rina Iri

"Saya tidak perlu intervensi karena saya tidak mengelola kepengurusan itu. Kalau selistri di Indor nasibnya sep saya, habis sudah."

"Biar nanti tin pengacara saya yang menkalau tidak hari Senin (2/8-red) atau Selasa (red) nanti. Yang penting jangan ada unsur dan fitnah. Kalau tidak salah kenapa harus sakan," tegasnya.

Rina menjelaskan selama ini dirinya tidak melakukan intervensi terhadap KSU Sojateh pelaksana proyek pembangunan GLA. Dirinya masuk dalam jajaran kepengurusan KSU Sojateh. Meskipun, ujar Rina, suaminya yakni Tony I masuk dalam jajaran kepengurusan KSU Sojateh. Ketika ditanya lebih jauh mengenai apa pelaksanaan proyek GLA sudah sesuai aturan, Rina tidak menjelaskannya.

Bersambung ke Hal

**Lincak Penyakit ikit-ikit**

**B**anyak orangtua mengeluh semenjak rumah sakit tumbuh di semua kawasan dan banyak dokter pribumi menguasai dunia kedokteran, sekarang ini telah beranak-pinak penyakit berbahaya bagi manusia. Masa lalu, kata mereka, penyakit yang membawa mati paling-paling malaria dan angin duduk. Sekarang, *waluh-waluh*, wabah *lelara*, *pagebluy buyangkara*, telah merambah di sembarang ranah.

Keluhan itu mungkin benar dan bisa juga salah kaprah. Dikatakan benar, karena eksese berbagai pencemaran lingkungan dan pola kehidupan manusia sendiri belum sedahsyat sekarang ini. Masa lalu, polusi lingkungan belum mengkhawatirkan, berbagai jenis makanan dan minuman manusia belum tercemar, maka manusia sehat-sehat, belum banyak penyakit.

Bersambung ke Hal 8 Kol 1

**Dorobutan iku...**

Penyakit *ikit-ikit*, yaitu penyakit hati. Penyakit *ikit-ikit* memiliki akibat

sambungan dari Hal 1

kukan se-  
pala Dis-  
ngat, ke-  
informa-  
ebut ber-  
figas Ja-  
anyakan  
ersebut.  
a menu-  
ni loka-  
Tengah  
ak," ka-  
nya tak  
ini. Dia  
uk me-  
"Kalau  
-nya."  
penge-

sambungan dari Hal 1

ntang  
sudah  
varga  
ak ta-  
di si-  
lit di-

linginya adalah adanya payung ker-  
tas dan sejumlah dupa di pinggirannya.  
Ketua RT 01/RW V Seliran, Jetis, Sukoharjo, Sutarno mengatakan, makam dikunjungi warga yang akan melaksanakan pernikahan. "Biasanya

ngudhal rasa, mengenyam perasaan, *ikhtilaf*, kontemplasi, perenungan men-

## Rina: Jangan

"Saya ini kan hanya kebetulan istrinya Pak Tony. Saya juga tidak pernah intervensi karena saya tidak masuk di kepengurusan KSU itu. Kalau semua istri di Indonesia nasibnya seperti saya, habislah sudah," tuturnya.

Rina meminta pengusutan kasus dugaan korupsi aliran dana GLA dilakukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Rina bahkan meminta jangan memasukkan unsur politis maupun fitnah dalam kasus tersebut. Saat ini, Rina menilai sebaiknya permasalahan kasus GLA diserahkan ke proses hukum yang sedang berjalan. Kendati kini dirinya terus-terusan dikaitkan dengan kasus korupsi GLA ini, Rina mengaku tetap dicintai rakyat Kabupaten Karanganyar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Bupati Karanganyar segera diperiksa Kejakti Jateng setelah namanya disebut JPU ikut menikmati aliran

yang nonedukatif, dan lain lain tindak kesadisan dan kebrutalan.

Saat puasa seperti sekarang ini, sa-

dana pembangunan perumahan GLA (SOLOPOS, 31/7). JPU dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi GLA dengan terdakwa Ketua KSU Sejahtera, Handoko Mulyono, di PN Karanganyar, Kamis (29/7), menyebut Bupati Rina dan suaminya Tony Iwan Haryono menerima aliran dana GLA senilai Rp 18,6 miliar lebih (SOLOPOS, 30/7).

## Kasus tuntas

Pada bagian lain, pengamat hukum asal UNS Solo, Prof DR Jamal Wiwoho SH MH saat dihubungi *Espos*, Sabtu petang, mengatakan penyebutan terkaitnya Rina dalam kasus GLA oleh JPU, menjadi hal pendukung untuk pengusutan tuntas kasus itu. "Pernyataan itu membuka peluang untuk pengusutan tuntas. Saya sependapat jika pemeriksaan itu tidak perlu menunggu persidangan Handoko Mulyono selesai," katanya.

## Perebutan juara

Sementara itu, rivalnya Arema pun memiliki motivasi tinggi. Setelah sukses meraih gelar juara Liga 1

ga final nanti," ujar sang arsitek Arema asal Belanda, Robert Renne AL-

ta tanpa ditakut-takuti Allahiah.

Selamat datang Ramadan, kita sungsong dengan ketulusan hati untuk berniat suci! □

sambungan dari Hal 1

Dia mengatakan pemeriksaan terhadap Rina yang *notabene* sebagai pejabat daerah memang harus menunggu izin dari presiden turun. "Bupati harus menjalani proses hukum sesuai prosedur, walaupun namanya sudah disebut dalam sidang namun dalam menunggu proses hukum ada asas praduga tidak bersalah karena posisinya masih bisa terlibat atau tidak terlibat."

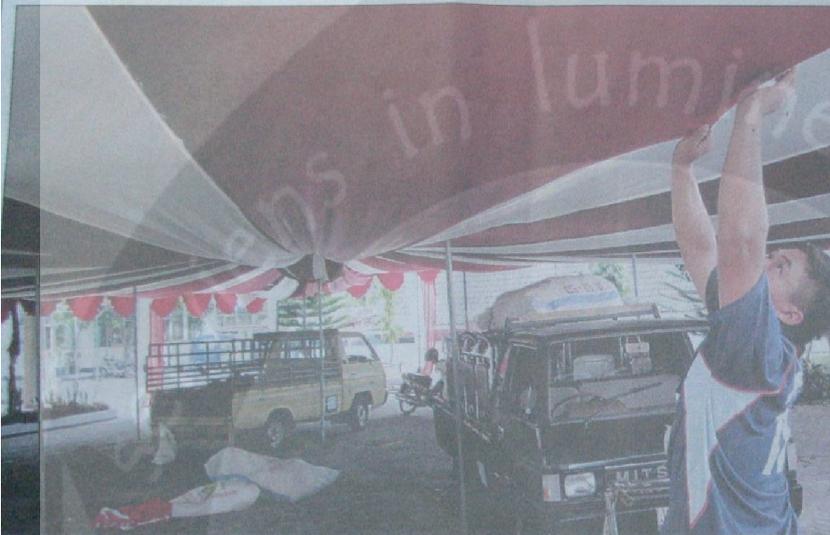
Mengenai pembantahan Rina yang disampaikan melalui pengacaranya, Rudy Alfonso SH dan disampaikan kepada wartawan lewat Kadishubkominfo Karanganyar, Nunung Susanto, Jumat (30/7) lalu, tak luput dari kritikan Jamal. Jamal menganggap Kadishubkominfo hanya berwenang menyampaikan pernyataan bupati yang terkait dengan tugas pemerintahan yang diemban. "Semestinya disampaikan sendiri atau membentuk tim pengacara." □

sambungan dari Hal 1

nilai lebih saat meredam kekuatan

Kasus dugaan korupsi GLA

# Jumpa pers, Rina banyak diam



Espos/Ahmad Mufid Aryono

**SANG TENDA**—Seorang pekerja tengah membenahi tenda VIP yang dipersiapkan untuk pelantikan bupati dan wakil bupati periode 2010-2015 di halaman gedung DPRD Boyolali, Senin (2/8).

## luansa merah putih dan janji pro investasi...

Oleh: Ahmad Mufid Aryono

Kesibukan di halaman Gedung DPRD Boyolali sudah terlihat sejak pagi. Ada pekerja yang mempersiapkan tenda, ada puang menata panggung hiburan lepas gedung wakil rakyat itu. Hari itu, Senin (2/8), adalah hari akhir persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2010-2015 Seno Samodro-Agus Purman-Semeta persiapan dilakukan secara matang agar pelantikan bupati dan wakil bupati ketiga dalam sejarah Kabupaten Boyolali, Selasa (3/8) berjalan lancar.

Para pekerja tampak sibuk memasang sejumlah perlengkapan tenda luas sekitar 600 meter persegi itu. Tak hanya itu, persiapan pelantikan juga terlihat di ruang paripurna. Para pekerja memasang kain pe-

dan tamu undangan.

Selain itu, beberapa orang juga masih membenahi *sound system* maupun perlengkapan lainnya di dalam ruang yang akan menjadi saksi sejarah pelantikan bupati dan wakil bupati Boyolali.

Nuansa merah putih terlihat di berbagai sudut ruangan di DPRD. Tenda VIP yang telah dipersiapkan panitia juga bermuana merah putih. Tenda yang menutupi seluruh halaman gedung DPRD itu rencananya akan disulap menjadi ruang bagi warga yang akan menyaksikan prosesi pelantikan bupati dan wakil bupati yang dipimpin Gubernur Jateng Bibit Waluyo.

Sementara, suasana di kediaman Wakil Bupati terpilih Agus Purman-to di Kampung Anggorosari, Pulisan tampak berbeda. Meski sudah dipasang tenda, namun belum ada keme-

Kepada sejumlah wartawan yang menemuinya, Agus Purmanto mengatakan pihaknya bersama Bupati Seno Samodro sudah melakukan pembicaraan intensif terkait program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

### Pemberantasan korupsi

Selain menciptakan Boyolali sebagai kabupaten pro investasi, pihaknya juga akan melakukan program lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan pemberantasan korupsi.

"Tidak perlu ada program 100 hari atau lainnya. Kami akan langsung melakukan gebrakan, tetapi tidak bisa kami sampaikan sekarang. Yang jelas sesuai dengan visi dan misi yang kami usung," ujarnya kepada wartawan.

### Karanganyar (Espos)

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, siap mengklarifikasi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) kasus dugaan korupsi Griya Lawu Asri (GLA) dengan terdakwa Handoko Mulyono yang menyebut dirinya menerima dana Rp 18,6 miliar.

● Oleh: Triyono

Namun, dalam jumpa pers yang digelar, Senin (2/8), Bupati Rina Iriani Sri Ratnaningsih lebih banyak diam. Semua pertanyaan dari wartawan dijawab oleh ketua tim penasihat hukumnya, Warsito Sanyoto.

Ketua tim penasihat hukumnya, Warsito Sanyoto menegaskan dakwaan jaksa untuk terdakwa Handoko me-

rupakan pengakuan sepihak terdakwa dan saksi-saksi yang perlu diklarifikasi dan dicek kebenarannya.

"Klien kami Ibu Rina Iriani selama ini belum pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jateng, sehingga yang diuraikan dalam dakwaan JPU semata-mata baru berdasarkan pengakuan terdakwa yang kebenarannya harus diuji," ungkap Warsito didampingi Rina Iriani dan anggota tim penasihat hukum, Daniel Tonapa Masiku, dalam jumpa pers di Karangpandan, Karanganyar, Senin (2/8).

### Terlalu prematur

Warsito menegaskan, terlalu prematur jika Rina Iriani dinyatakan terlibat dan menikmati aliran dana subsidi sebelum dilakukan pemeriksaan lebih dulu kepada yang bersangkutan. Posisi Rina Iriani sebagai istri tersangka Tony Haryono, ujarnya, tak bisa serta merta dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang disangkakan kepada Tony.

"Mengingat tidak ada kaitannya dan klien kami Ibu Rina Iriani tidak pernah berurusan dengan KSU Sejahtera. Seharusnya klien kami dikonfrontasi terlebih dahulu dalam BAP (berita acara pemeriksaan-red). Hal itu belum pernah dilakukan penyidik," tegas Warsito. Dia mengatakan, kliennya juga akan proaktif jika ada panggilan dari Kejaksaan Jateng.

Bersambung Ke Hal VI Kol 4

**Jumpa pers** ..... sambungan dari Hal SOLORAYA

Advokat dari Law Office Warsito Sanyoto & Partner ini mengungkapkan, besar kemungkinan pihaknya melakukan upaya hukum jika tuduhan kepada Rina ternyata terbukti tidak berdasar.

Pada bagian lain Warsito meminta agar semua pihak mengedepan-

kan serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah berkaitan dengan penyebutan nama Rina Iriani dalam surat dakwaan tim JPU untuk terdakwa Handoko Mulyono. Hal itu, serunya, agar tidak terjadi *trial by the press* dalam penegakan hukum kasus ini.

Dalam jumpa pers itu, Rina Iriani juga didampingi Kepala Dishubkominfo, Nunung Susanto; Kepala Kesbangpolinmas, Ign Trianto; Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tatag Prabawanto dan Direktur Marketing dan Operasional BPR BKD Karanganyar, Prihanto. □

**3 Siswa** ..... sambungan dari Hal SOLORAYA

Dari hasil rontgen Imam diketahui mengalami pendarahan dalam Pemu-

hingga kini masih trauma dan takut dikeluarkan dari sekolah. Kepala SMPN

mudian dilaporkan ke Polsek Tanon Sragen. Senin (6/9) Kepala



SOLOPOS, 6 Agustus 2010

**PABRIK DITUTUP**—Petugas gabungan dari Disperindag, Satpol PP Pemkab Sukoharjo dan Polres Sukoharjo memeriksa pabrik tabung gas elpiji 3 kg PT Windika Indo Niaga di Dukuh Tambak,

Grogol, Sukoharjo, Kamis (5/8) (foto kiri). Petugas Satpol polisi di depan pintu pabrik menandai ditutupnya operasi

Kasus dugaan korupsi GLA

# Handoko beberkan aliran Rp 370 juta

**Karanganyar (Espos)**



Terdakwa kasus dugaan korupsi perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar, Handoko Mulyono, mulai buka mulut. Dari Rp 370 juta lebih yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) menyalurkan dirinya, Handoko mengaku uang itu di-

Indonesia Timur, di hadapan tahun anggaran telah menerima pengadaannya.

Anggota Wantimpres Menteri Kesehatan upari batal dipenik oleh penyidik KPK karena sedang me-

dan Syafiq, KPK Ju-an Lubes RI di Amu- Sudjadnan Parro- ditahan atas duga- zesi gedung kantor- ar wisma DCI dan- mas KBRI di Singa- r-2009.

ng saat kejadian ma- agat Sekjen Depar- eri di laga memu- i US\$200.000. Ba- a untuk memberi- r atas usulan Ang- Tambahan senilai- dte

lari Hal 1

iku nemu dompet Ti- eng tak buka pelan- sto istrinya, tak cek la- ompetku dewe yang- ingnya tidak tengge- spun ngguyu keping- dengar jawaban. Ko- etap bersyukur tidak- ompet.  Kiriman- ani, Jl Dr Radjiman

Reskrim dilibatkan dalam penghentian aktivitas pabrik.

Terkait perkembangan kasus, hingga saat ini masih memanggil saksi-

### Handoko beberkan

Yuri juga menyatakan, untuk pengeluaran dana, sebagian besar dilengkapi dengan kuitansi dan tanda tangan penerima sebagai tanda bukti pemberian uang. Namun demikian ada pula sebagian lain pencairan dana yang tidak dilengkapi dokumen. Hal itu, kata dia, akan terungkap secara jelas dalam pemeriksaan saksi-saksi selama proses persidangan.

Sementara itu, Handoko Mulyono, dalam pernyataannya menyebutkan dana Rp 370 juta yang dilakukan JPU mengalirkannya diberikan kepada berbagai pihak atas perintah Tony Dwi Haryono. Tidak termasuk pencairan dana dengan uraian bantuan langsung masyarakat, pejabatnya tersebut juga atas instruksi Tony.

"Semua dengan perintah dan atas sepengetahuan Pak Tony. Saya dalam hal ini hanya menjalankan tugas dan yang bersangkutan sebagai Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera," ujar Handoko ketika dicegah wartawan saat proses persidangan.

Disinggung mengenai adanya aliran dana guna operasional DPRD Karanganyar senilai Rp 135 juta, Handoko berterus terang uang itu diserahkan sendiri secara langsung melalui Bam-

tar Perusahaan No 113512800526 tanggal 5 Januari 2009 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No 45/11.35/PB/I/2009.

bang Hermawan pada 1 Januari 2010. Namun dia tidak menjelaskan uang itu kemudian diberikan kepada siapa mengingat saat itu Bambang sudah tidak lagi menjabat anggota DPRD.

Sejerti pula tercantum dalam lampiran eksepsi terdakwa Handoko Mulyono atas dakwaan tim JPU, dari dana Rp 370 juta yang diduga dikuasai Ketua KSU Sejahtera itu sebagian besarnya dihiruk dengan uraian bantuan langsung masyarakat. Tidak termasuk dengan dua pencairan dana guna biaya rumah sakit anak angkat Bupati Cantika yang akrab dipanggil Chacha.

Dalam catatan tim penasihat hukum Handoko Mulyono, pengeluaran uang untuk biaya rumah sakit Can-

delegasi, wisnu tak mau menjawab. "Pokoknya sudah didelesikan. Ya sudah itu saja. Saya *no comment*," tandasnya.  **aps/ufi**

sambungan dari Hal 1

tika atau Chacha masing-masing dikeluarkan pada 22 Mei 2008 senilai Rp 10 juta dan tanggal 26 Mei 2008 senilai Rp 1,675 juta. Uang dikeluarkan dari Bank Bukopin, namun tidak disebutkan secara jelas Bank Bukopin mana dan rumah sakit tempat Chacha dirawat.

Sementara itu Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, tidak membantah dan tidak membenarkan perihal dugaan aliran dana Rp 135 juta dari Handoko Mulyono guna operasional DPRD. "Kalau memberi uang DPRD, lalu siapa yang menerima? Di Karanganyar kan ada 45 anggota DPRD," ujarnya singkat saat diminta konfirmasi melalui telepon genggamnya.

Pada bagian lain, terkait dakwaan JPU penasihat hukum Handoko Mulyono dalam eksepsi atau keberatannya menyatakan penyampaian turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada tersangka atau kuasa hukumnya telah melanggar Pasal 143 ayat (4) KUHP. Hal itu karena turunan surat dakwaan yang seharusnya diterima bersamaan waktunya dengan saat pelimpahan ke pengadilan, Selasa (20/7), ternyata baru diterima setelah malam harinya.

Tanggal	Uraian	Nominal
2/9/2008	Pinjaman pihak ke-3 (Bupati)	Rp 10 juta
	Pinjaman pihak ke-3 (Tony)	Rp 5 juta
8/10/2008	Pinjaman pihak ke-3 (Rina Centricipulan bawar/bakho)	Rp 30 juta
18/10/2008	Biaya DP Klaten Pakada	Rp 30 juta
27/11/2008	Operasional OD & W/R	Rp 3 juta
19/12/2008	Uang sakur konsultan	Rp 5 juta
9/2/2009	Operasional ke Bandung	Rp 10 juta
27/2/2009	Operasional Selayawan	Rp 1,8 juta
4/3/2009	Operasional Inspektorat Prov	Rp 6,5 juta
1/1/2010	Operasional DPRD	Rp 135 juta
	Uang Handoko & bagian	Rp 10 juta
	<b>Total</b>	<b>Rp 370,539 juta</b>

Sumber: Eksepsi Tim Penasihat Hukum Handoko Mulyono  try

**Analisis Peristiwa Kasus Dugaan Korupsi Perumahan Griya Lawu Asri yang melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani di Surat Kabar Harian SOLOPOS, Edisi tanggal 9 Maret 2010, “ Segera Periksa Bupati Rina”**

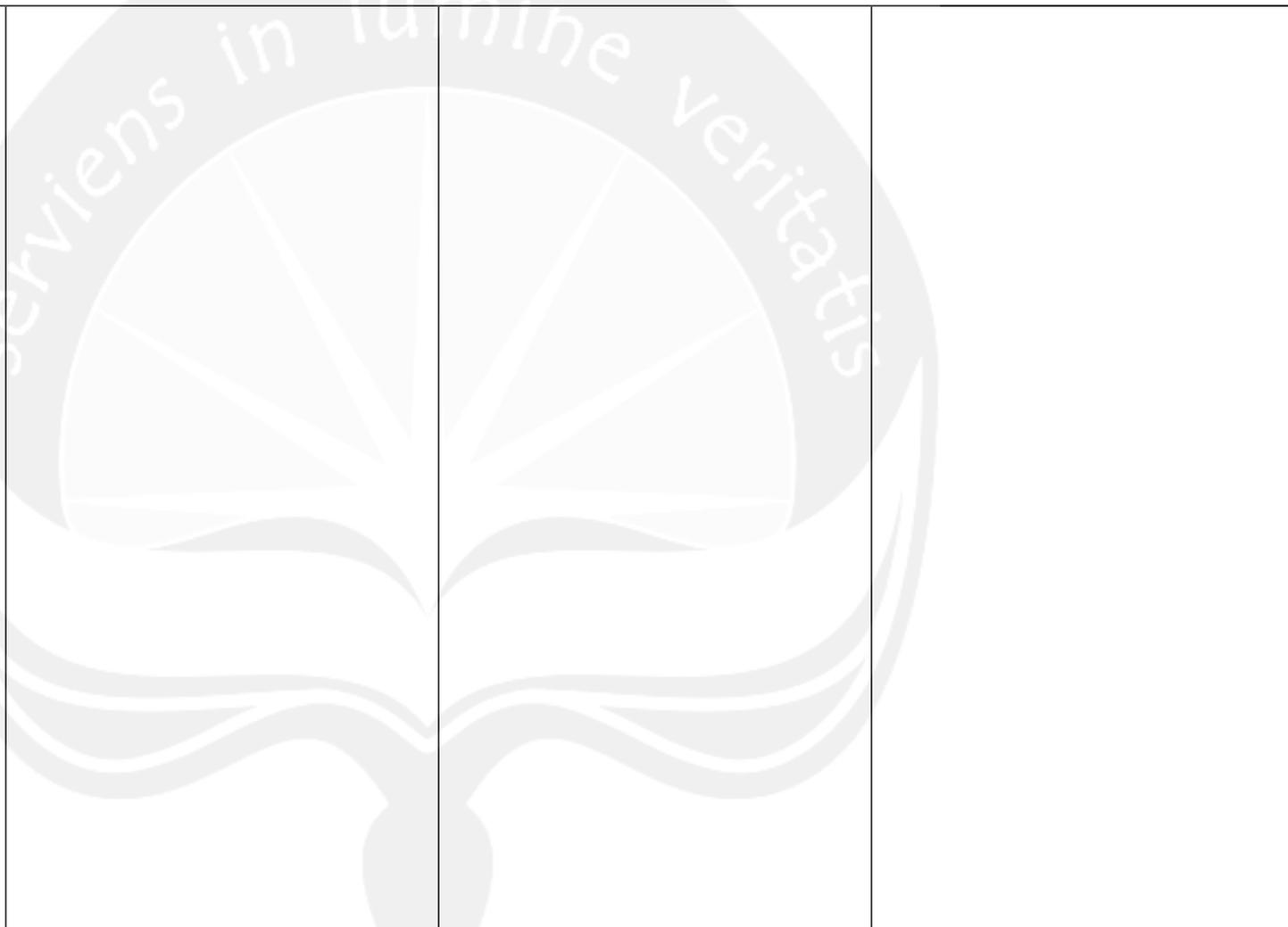
<b>SKRIP</b>	<b>TEMATIK</b>	<b>SINTAKSIS</b>	<b>RETORIS</b>
<p>Solopos mengangkat berita tentang Kasus Dugaan Korupsi Griya Lawu Asri Karanganyar, yang melibatkan Bupati Rina Iriani bersama Suaminya Toni Haryono.</p> <p>Narasumber yang dipilih dalam berita ini, Kuasa hukum Handoko Mulyono, Dwiyono Noto Saputra, SH, Salman Maryadi selaku Kajakti Jateng dan Muh Saifuddin SH selaku Penasihat Hukum Handoko Mulyono</p> <p>Dwiyono Noto Saputra, SH sebagai Kuasa Hukum Handoko Mulyono tersangka kasus GLA Karanganyar yang mengajukan penangguhan penahanan kliennya</p>	<p>Tema berita yang diangkat mengenai pengajuan penangguhan penahanan Handoko Mulyono serta dugaan keterlibatan Bupati Rina Iriani dan Toni Haryono yang disampaikan oleh kuasa hukum Handoko Mulyono, Dwiyono Noto Saputra, SH.</p>	<p>Judul <i>Headline</i> “ Segera Periksa Bupati Rina”</p> <p>Dari Judul yang dipilih tersebut, redaktur mengarahkan pembaca bahwa Bupati Rina segera diperiksa dalam dugaan kasus korupsi GLA Karanganyar.</p> <p>Hal ini dikuatkan dengan pernyataan kuasa hukum Handoko Mulyono, Dwiyono Noto Saputra, SH yang menyatakan bahwa perlunya diadakan pemeriksaan terhadap Bupati Rina dan Suaminya Toni Haryono berkaitan dengan dugaan adanya aliran dana GLA ke Rina Center atas permintaan Toni.</p>	<p>Penulisan judul “ Segera Periksa Bupati Rina” , Kalimat tersebut memberi penekanan bahwa Bupati Rina akan diperiksa sehubungan keterlibatan dalam kasus ini.</p> <p>Dalam paragraf selanjutnya dituliskan mengenai pernyataan Dwiyono Noto Saputra, SH, kuasa hukum Handoko Mulyono yang meminta kejakti memeriksa Bupati Rina dan Toni Haryono</p> <p>Penggunaan unsur metafor pada penulisan pernyataan kejakti jateng, Salman Maryadi. Yaitu penggunaan kata “tak akan terbang pilih“ .</p>

di kejakti. Pernyataan ini terdapat dalam paragraf 2

Hal ini diungkapkan Dwiyono Noto Saputra, SH karena menurutnya ada keterlibatan aktor intelektual dalam kasus ini. Pernyataan ini terdapat dalam paragraf 3-4.

Selain itu, Dwiyono Noto Saputra, SH mrnyatakan perlu adanya pemeriksaan oleh penyidik Kejati terhadap aliran dana GLA ke Rina Center yang melibatkan Bupati Rina dan suaminya Toni Haryono. Pernyataan ini terdapat dalam paragraf 5-6

Salman Maryadi selaku Kajakti Jateng, mengenai kemungkinan bertambahnya tersangka, dan mengatakan menunggu bukti yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kasus GLA. Hal ini terdapat dalam paragraf 8-9.



--	--	--

<p>Muh Saifuddin SH selaku Penasehat Hukum Handoko Mulyono menyatakan pemeriksaan kasus GLA masih pada tahap saksi belum pada pemeriksaan Bupati Rina. Pernyataan inii terdapat pada paragraf 10</p>			
<p>Kasus GLA Karanganyar tentang penangguhan penahanan tersangka Handoko Mulyono yang memunculkan nama baru menjadi sorotan dalam pemberitaan kali ini.</p>		<p>Penekanan terlihat dari pemilihan judul atau <i>headline</i> yang digunakan dan kutipan-kutipan langsung dari pernyataan narasumber.</p>	
<p><i>Frame</i> yang digunakan SOLOPOS pada berita ini, yakni tentang penangguhan penahanan tersangka Handoko Mulyono yang disampaikan kuasa hukumnya Dwiyono Noto Saputra, SH. Hal ini berkaitan dengan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini yakni Bupati Rina dan suaminya Toni Haryono, dalam hal aliran dana ke Rina Center.</p>			

**Analisis Peristiwa Kasus Dugaan Korupsi Perumahan Griya Lawu Asri yang melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani di Surat Kabar Harian SOLOPOS, Edisi tanggal 15 Juni 2010, “7 Parpol diduga terima dana GLA”**

SKRIP	TEMATIK	SINTAKSIS	RETORIS
<p>SOLOPOS mengangkat berita tentang tujuh parpol yang diduga menerima aliran dana GLA, beserta pernyataan dan klarifikasi dari parpol yang bersangkutan.</p> <p>Narasumber yang dipilih dalam berita ini yakni, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajakti) Jawa Tengah Salman Maryadi, Sri Hartono selaku Ketua DPD PKS. Ketua DPC PDIP Paryono, Romdloni selaku Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ketua DPC Partai Demokrat Karanganyar Rianto Subekti dan Mugiharjo selaku Ketua DPC PKB.</p> <p>Salman Maryadi sebagai Kajakti</p>	<p>Tema berita yang diangkat dalam berita ini, pertama mengenai 7 parpol yang diduga menerima aliran dana GLA berdasar informasi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah</p> <p>Tema berita yang kedua mengenai konfirmasi kelima Parpol yang diduga menerima aliran dana GLA</p>	<p>Judul <i>Headline</i>: 7 Parpol diduga terima dana GLA</p> <p><i>Lead</i>: Tujuh partai politik (parpol) di kabupaten Karanganyar diduga menerima aliran dana korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar. Namun, hal ini dibantah oleh parpol- parpol</p> <p>Lead yang digunakan masuk dalam kategori <i>lead</i> dengan gaya bercerita (<i>narrative lead</i>)</p> <p>Dari judul <i>Headline</i> dan <i>lead</i> tersebut mengarahkan kepada tema yang menunjukkan sebanyak tujuh parpol di kabupaten karanganyar diduga menerima</p>	<p>Pemilihan judul dengan jenis dan ukuran <i>font</i> yang jelas dan tegas, mengarahkan pembaca kepada peristiwa yang ingin disajikan dalam berita ini.</p> <p>Penggunaan tanda kutip pada kutipan langsung yang ditampilkan menjadi bukti objektifitas apa yang ingin disampaikan SOLOPOS.</p> <p>Penggunaan unsur ilustrasi grafis berupa kronologi perjalanan kasus Griya lawu Asri. Hal ini memberikan penekanan peristiwa kasus Griya Lawu Asri mencuat.</p> <p>Pemilihan ilustrasi gambar rumah beratapkan uang lembar 100.000-an.</p>

<p>Jateng dalam pernyataannya menduga adanya dana aliran GLA yang mengalir ke tujuh parpol berdasarkan keterangan saksi, bukti-bukti dan tersangka. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 3</p> <p>Selain itu, Salman Maryadi mengatakan telah memeriksa sejumlah pimpinan parpol dan menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 4-5.</p> <p>Salman maryadi juga menyatakan belum bersedia bekomentar terkait Bupati Rina. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 6.</p> <p>Sri Hartono selaku Ketua DPD PKS mengatakan pihaknya memang mendapatkan dana untuk pemenangan Bupati Rina. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 7</p> <p>Selain itu juga, Sri Hartono</p>		<p>alirann dana perumahan GLA berdasarkan informasi dai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari konfirmasi dari ketua- ketua parpol yang diduga menerima aliran dana GLA.</p> <p>Adanya kutipan pernyataan dari berbagai pihak, baik dari Kajakti Jawa Tengah maupun parpol yang diduga menerima aliran dana GLA. Hal ini memberikan kesan bahwa berita yang dibuat oleh wartawan mengandung unsur netral tentang 7 parpol yang diduga menerima aliran dana GLA berdasarkan informasi Kejakti Jawa Tengah.</p>	
---	--	--	--

mengatakan belum percaya dana tersebut berasal dari dana GLA, dan masih menunggu keterangan dan bukti yang konkret dari Kejakti Jateng. Pernyataan ini terdapat Paragraf 8

Paryono selaku Ketua DPC PDI mengatakan tidak mengetahui aliran GLA yang masuk ke partainya. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 9

Menurut Paryono tidak ada keterkaitan antara dana Pilkada dengan KSU Sejahtera sehingga perlu mengklarifikasi dengan Ketua DPC PDIP sebelumnya, Sumanto. Kutipan tidak langsung ini terdapat pada paragraf 10-11

Romdloni selaku Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk memberikan komentar tentang aliran dana GLA yang diduga masuk ke partainya sebelum ada perkembangan. Pernyataan ini terdapat pada

<p>paragraf 12</p> <p>Rianto Subekti selaku Ketua DPC Partai Demokrat Karanganyar tidak mengetahui aliran dana GLA yang masuk kepartainya dan menyatakan secara pribadi Toni Haryono mempunyai hutang kepada Partainya. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 13.</p> <p>Mugiharjo selaku Ketua DPC PKB mengatakan mendapatkan dana konsolidasi dari Bupati Rina, tetapi tidak mengetahui dana tersebut dari dana GLA. Pernyataan tersebut terdapat pada paragraf 14-16.</p>			
<p>Hasil informasi Kejaksaan Tinggi Semarang menyebutkan sebanyak 7 parpol di Karanganyar ikut menikmati aliran dana GLA. Pemilihan narasumber yang merupakan ketua dari masing-masing parpol yang menerima aliran dana tersebut memberi kesan seolah ketidaklibatan parpol tersebut dalam aliran dana GLA tersebut.</p>	<p>Penekanan terlihat pada judul dan lead yang digunakan, dari judul dan lead di cermati bahwa selama ini dana aliran GLA di terima oleh 7 parpol di Karanganyar. Dan hal ini diperkuat dengan grafis yang ditonjolkan untuk menguatkan aliran dana yang diterima parpol-parpol di Karanganyar.</p>		
<p>Aliran dana yang diterima 7 Parpol terkait aliran dana GLA menjadi penekan SOLOPOS dalam pemberitaan kali ini. SOLOPOS menekankan bahwa adanya 7 parpol yang diduga menerima aliran dana tersebut, dan sejumlah ketua parpol membatah aliran dana yang diterima.</p>			

**Analisis Peristiwa Kasus Dugaan Korupsi Perumahan Griya Lawu Asri yang melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani di Surat Kabar Harian SOLOPOS, Edisi tanggal 30 Juli 2010, “ JPU: Rina terima Rp 18,6M”**

<b>SKRIP</b>	<b>TEMATIK</b>	<b>SINTAKSIS</b>	<b>RETORIS</b>
<p>Solopos mengangkat berita tentang fakta yang diungkapkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai dugaan keterlibatan Bupati Rina dan suaminya, Tony Iwan Haryono dengan menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi Griya Lawu Asri Karanganyar, senilai 18,6 miliar lebih.</p> <p>Narasumber yang dipilih dalam berita ini yakni, anggota tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sukarman, S.H, terdakwa Handoko Mulyono, Bupati Rina, koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Salman, koordinator tim JPU Istyas Joni, S.H, Ketua Majelis Hakim</p>	<p>Tema berita yang diangkat yaitu mengenai dugaan keterlibatan Bupati Rina bersama suaminya, Tony Haryono dalam aliran dana korupsi GLA Karanganyar, yang disebutkan telah menerima sebesar lebih kurang 18,6 M.</p> <p>Tema kedua yang diangkat adalah mengenai sidang perdana kasus dugaan korupsi perumahan GLA Karanganyar dengan terdakwa Handoko Mulyono.</p>	<p>Judul <i>Headline</i>: “JPU: Rina terima 18,6M”</p> <p><i>Lead</i>: “ Bupati Rina Iriani SR dan suaminya, Tony Iwan Haryono disebut menerima aliran dana proyek...”</p> <p>Dari judul <i>Headline</i> dan <i>Lead</i> tersebut telah mengarahkan pembaca kepada tema utama berita ini, yaitu tentang dugaan keterlibatan Bupati Rina dan Suaminya dalam menerima aliran dana dugaan korupsi GLA.</p> <p>Adanya kutipan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa berita ini disusun bukan hasil opini dari wartawan melainkan atas fakta peristiwa yang dituliskan kembali</p>	<p>Penulisan Judul berita dengan menggunakan tanda baca ( : ) yang menunjukkan bahwa kalimat yang dimaksud adalah sebuah pernyataan yang berasal dari pelantunnya, dalam hal ini JPU.</p> <p>Penggunaan kata “disebut” pada <i>lead</i> berita menjelaskan kembali dari judul yang ada, bahwa pernyataan bahwa Rina terima Rp. 18,6 M adalah sebuah pernyataan langsung dari narasumber dan bukan opini wartawan.</p> <p>Penggunaan unsur leksikon “menuding” pada kalimat yang dituliskan wartawan dalam mewakili sikap Handoko Mulyono</p>

<p>RE Setiawan, S.H, dan juga Arif ajudan Bupati Rina yang ditemui wartawan saat hendak melakukan konfirmasi kepada Bupati Rina.</p> <p>Keterlibatan Sukarman, S.H sebagai tim JPU adalah sebagai narasumber yang membacakan surat dakwaan untuk Handoko Mulyono yang menyatakan adanya keterlibatan Bupati Rina dan suaminya dalam aliran dana dugaan korupsi GLA. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 3-5.</p> <p>Handoko Mulyono sebagai terdakwa, dalam berita ini sebagai narasumber yang memberikan pernyataannya kepada wartawan bahwa Rina dan Tony adalah aktor intelektual di belakang kasus ini. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 6-7.</p> <p>Keterlibatan Bupati Rina adalah dengan pernyataannya pada wartawan beberapa waktu sebelumnya mengenai bantahannya</p>	<p>oleh wartawan.</p> <p>Latar peristiwa yang dimunculkan dalam berita ini adalah mengenai sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa ketua KSU Sejahtera, Handoko Mulyono.</p>	<p>yang tegas dalam pernyataannya mengenai keterlibatan Bupati Rina dan suaminya sebagai aktor intelektual.</p> <p>Unsur grafis dimunculkan dalam berita ini melalui ilustrasi gambar rumah dengan dinding-dinding lembaran uang kertas seratus ribuan.</p> <p>Unsur grafis juga dimunculkan dengan sebuah tabel yang berisi paparan JPU soal aliran dana pembangunan rumah bersubsidi 2007 dan 2008.</p>
---	--	---

pada dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. Pernyataan Bupati Rina terdapat pada paragraf 11.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Salman, keterlibatannya dalam hal ini yaitu dalam pernyataannya untuk meminta Kejakti Jateng segera memeriksa Bupati Rina. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 12.

Keterlibatan koordinator tim JPU Istyas Joni, S.H dalam berita ini adalah dalam pembacaan dakwaan primernya di persidangan kepada terdakwa Handoko Mulyono. Pernyataan tersebut terdapat pada paragraf 14 dan 18.

Ketua Majelis Hakim RE Setiawan, S.H Heri Supriyono Keterlibatannya untuk memimpin sidang tuntutan yang berjalan pada hari itu dan memberitahukan bahwa sidang lanjutan akan berjalan pada Kamis tanggal 5

--	--	--

<p>September 2010 yakni guna mendengarkan eksepsi dari terdakwa Handoko Mulyono. Pernyataan terdapat pada paragraf 20.</p> <p>Keterlibatan Arif ajudan Bupati Rina yaitu pada waktu ditemui wartawan saat hendak melakukan konfirmasi kepada Bupati Rina, terkait kasus ini. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 8.</p>			
<p>SOLOPOS dalam berita ini lebih menekankan tentang keterlibatan Bupati Rina bersama suaminya, Tony Haryono dalam aliran dana korupsi GLA Karanganyar, yang disebutkan telah menerima sebesar lebih kurang 18,6 M pada sidang perdana kasus dugaan korupsi perumahan GLA Karanganyar dengan terdakwa Handoko Mulyono.</p>		<p>Penekanan secara jelas dimunculkan pada judul berita, yang langsung membawa pembaca kepada fokus pemberitaan.</p> <p>Adanya penekanan terlihat dengan munculnya unsur grafis berupa ilustrasi gambar rumah dengan dinding-dinding lembaran uang kertas seratus ribuan dan sebuah tabel yang berisi paparan JPU soal aliran dana pembangunan rumah bersubsidi 2007 dan 2008.</p>	
<p>Frame yang digunakan SOLOPOS pada berita ini, yakni mengenai dugaan keterlibatan Bupati Rina bersama suaminya, Tony Haryono yang ikut menerima aliran dana korupsi GLA Karanganyar, sebesar lebih kurang 18,6 M, yang dinyatakan oleh JPU dalam pembacaan surat dakwaan kepada Handoko Mulyono dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi GLA Karanganyar.</p>			

**Analisis Peristiwa Kasus Dugaan Korupsi Perumahan Griya Lawu Asri yang melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani di Surat Kabar Harian SOLOPOS, Edisi tanggal 31 Juli 2010, “ Jaksa segera periksa Bupati Rina”**

<b>SKRIP</b>	<b>TEMATIK</b>	<b>SINTAKSIS</b>	<b>RETORIS</b>
<p>Solopos mengangkat berita tentang fakta baru yang disampaikan kepala Kejakti Jateng bahwa akan segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Karanganyar Rina Iriani terkait kasus dugaan korupsi perumahan GLA.</p> <p>Narasumber dalam berita ini yaitu, Salman Maryadi Kepala Kejakti Jateng, Bupati Karanganyar Rina Iriani, Penasehat hukum Rina Rudy Alfonso, S.H, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Karanganyar Nunung Susanto, tim JPU yang dipimpin Istyas Joni, S.H, Tim Penasihat Hukum.</p>	<p>Tema utama berita yang diangkat yaitu mengenai fakta baru dari Kejakti Jateng yang akan segera melakukan pemeriksaan kepada Bupati Rina, terkait kasus dugaan aliran dana korupsi pembangunan perumahan GLA.</p> <p>Tema ke-dua dalam berita ini yakni mengangkat mengenai bantahan Bupati Rina terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan GLA, yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, Rudy Alfonso.</p>	<p>Judul <i>Headline</i>: “Jaksa segera periksa Bupati Rina”  <i>Lead</i>: “ Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih segera diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng...”            Dari judul <i>Headline</i> dan <i>Lead</i> tersebut telah mengarahkan pembaca kepada tema utama berita ini, yaitu tentang rencana kejaksaan tinggi untuk segera memeriksa Bupati Rina.</p> <p>Adanya kutipan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa berita ini disusun bukan hasil opini dari wartawan melainkan atas fakta peristiwa yang dituliskan kembali oleh wartawan.</p>	<p>Pemilihan judul dalam berita kali ini tertulis lebih lugas dan jelas, tanpa unsur semiotik dan oleh pembaca akan lebih mudah untuk dimengerti maksud dari isi pemberitaan.</p> <p>Unsur grafis dimunculkan dalam berita ini melalui ilustrasi gambar rumah dengan pondasi lembaran uang kertas seratus ribuan.</p> <p>Unsur grafis juga dimunculkan berupa tanggapan parpol terhadap dana GLA, yang di kemas dalam sebuah susunan dengan gambar parpol masing-masing dan tanggapan yang disampaikan. Hal ini berhubungan dengan dugaan</p>

<p>Keterlibatan Kepala Kejakti Jateng, Salman Maryadi dalam berita ini yakni memberikan pernyataan untuk segera memeriksa Bupati Rina terkait kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan GLA. Pernyataan ini terdapat dalam paragraf 1-5.</p> <p>Bupati Karanganyar Rina Iriani, dalam berita ini memberikan bantahannya terkait dugaan sebagai tersangka yang disebutkan Kejakti untuk segera diperiksa. Pernyataan ini terdapat dalam paragraf 6.</p> <p>Keterlibatan Penasehat hukum Rina Rudy Alfonso, S.H, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Karanganyar Nunung Susanto, dalam berita ini adalah sebagai pelantun yang menyampaikan bantahan Bupati Rina. Terdapat dalam paragraf 7-8.</p> <p>Keterlibatan tim JPU yang dipimpin Istyas Joni, S.H dalam</p>	<p>Latar peristiwa berawal pada pernyataan Kejakti Jateng di Semarang, kemudian berkembang pada bantahan Bupati Rina terhadap dugaan keterlibatannya.</p>	<p>keterlibatan Bupati Rina dalam aliran dana GLA.</p>
--	---	--

<p>berita ini yakni sebagai pelibat terkait surat dakwaan dalam persidangan dengan terdakwa Handoko Mulyono, yang oleh Tim Penasihat Hukum akan dilakukan kajian lebih lanjut.</p>			
<p>Kasus GLA Karanganyar yang diangkat SOLOPOS dalam edisi ini tentang fakta baru Kejakti Jateng keterlibatan Bupati Rina dalam kasus dugaan korupsi aliran dana GLA dan bantahan dari Bupati Rina atas keterlibatannya. Narasumber yang dipilih SOLOPOS, adanya netralitas dari <i>frame</i> SOLOPOS.</p>		<p>Penekanan terlihat dari pemilihan judul atau <i>headline</i> yang digunakan dan kutipan-kutipan langsung dari pernyataan narasumber.dan unsur gambar dan grafis menunjukkan korupsi dan dugaan aliran dana GLA yang diberikan Bupati Rina kepada sejumlah Parpol.</p>	
<p><i>Frame</i> yang digunakan SOLOPOS pada berita ini, yakni tentang bantahan Bupati Rina melalui kuasa penasihat hukumnya atas keterlibatannya dalam aliran dana GLA yang dikatakan terdakwa Handoko Mulyono dan Kejakti akan mengusut tuntas dugaan korupsi terhadap kasus GLA ini dan akan segera memanggil bupati Rina.</p>			

**Analisis Peristiwa Kasus Dugaan Korupsi Perumahan Griya Lawu Asri yang melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani di Surat Kabar Harian SOLOPOS, Edisi tanggal 1 Agustus 2010, “Rina: Jangan dipolitisasi!”**

SKRIP	TEMATIK	SINTAKSIS	RETORIS
<p>SOLOPOS mengangkat berita tentang pernyataan Bupati Karanganyar Rina Iriani siap diperiksa terkait aliran dana GLA.</p> <p>Narasumber yang dipilih dalam berita ini yakni, Bupati Karanganyar Rina Iriani, dan Pengamat Hukum UNS Solo, Prof DR Jamal Wiwoho SH MH</p> <p>Kutipan tidak langsung pernyataan Rina terkait pemanggilan Kejakti terkait aliran dana GLA dan bantahan Rina meminta kasus GLA tidak dipolitisasi. Kutipan tidak langsung ini terdapat pada paragraf 1-4</p> <p>Rina menyatakan tidak pernah</p>	<p>Tema berita yang diangkat dalam berita ini, pertama pernyataan Bupati Karanganyar Rina Iriani terhadap kesiapan diperiksa terkait kasus GLA</p> <p>Tema berita yang kedua mengenai Rina Iriani pendukung pengusutan tuntas Kasus GLA</p>	<p>Judul <i>Headline</i>: Rina: jangan dipolitisasi</p> <p><i>Lead</i>: Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih, Sabtu (31/7), menyatakan siap diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng terkait dugaan korupsi aliran dana kasus pembangunan perumahan Griya Lawu Asri (GLA). Rina juga meminta kasus GLA tidak dipolitisasi.</p> <p>Dari judul dan lead mengantarkan pembaca kepada tema berita yang utama, yakni pernyataan Bupati Karanganyar meminta kasus GLA jangan dipolitisasi.</p>	<p>Pemilihan judul dengan jeni dan ukuran font yang jelas dan tegas, mengarahkan pembaca kepada peristiwa yang ingin disajikan dalam berita ini.</p> <p>Penggunaan tanda kutip pada kutipan langsung yang ditampilkan menjadi bukti objektifitas apa yang disampaikan SOLOPOS..</p> <p>Adanya kolom foto dari Bupati Rina Iriani dan pernyataan yang dijadikan kutipan singkat.</p> <p>Penggunaan tanda baca (:) didepan kata “Rina” yang bertindak sebagai pelantun.</p> <p>Unsur retorik yang dimunculkan</p>

<p>mengintervensi kepengurusan KSU Sejahtera. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 5</p> <p>Rina juga meminta agar penyusutan kasus GLA ini dilakukan berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Pernyataan tidak langsung terdapat pada paragraf 6</p> <p>Prof DR Jamal Wiwoho SH MH, selaku Pengamat Hukum UNS Solo menyatakan penyebutan Rina dalam kasus GLA menjadi pendukung penyusutan tuntas kasus GLA. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 8.</p> <p>Prof DR Jamal Wiwoho SH MH juga menyatakan pemeriksaan Rina Iriani harus menunggu proses hukum sesuai prosedur. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 9</p> <p>Dan Prof DR Jamal Wiwoho SH MH juga menyatakan pernyataan bupati bukan disampaikan kadishubkominfo tapi membentuk</p>	<p>Adanya kutipan pernyataan dari pakar hukum UNS Solo, Prof DR Jamal Wiwoho SH MH terkait pernyataan Rina, Sehingga ada unsur netral apa yang ditulis oleh wartawan.</p>	<p>pada penggunaan leksikon “<i>open house</i>” dan “<i>notabene</i>”. Kata- kata ini secara awam memiliki makna yang mengarah kepada fungsional pada jajaran penguasa atau pemilik kekuasaan .</p> <p>Unsur gambar, foto, dan kombinasi ilustrasi grafis juga dimunculkan ditengah- tengah paragraph berita ini. Foto Bupati Karanganyar Rina Iriani disusun dengan ilustrasi grafik dengan kutipan pernyataan</p>
---	---	---

<p>tim pengacara. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 10</p>			
<p>Kesiapan Bupati Rina untuk diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa tengah menjadi sorotan dalam pemberitaan kali ini. Pemilihan narasumber yang kontra untuk segera memeriksa Bupati Rina, karena merupakan pendukung penyusutan tuntas kasus GLA.</p>		<p>Penekanan terlihat dari judul dan lead yang digunakan, dari judul dan lead dapat dicermati bahwa Bupati Rina siap diperiksa, namun Rina juga meminta kasus GLA tidak dipolitisasi. Hal ini didukung grafis foto dan menyertakan kutipan pernyataan dari Bupati Rina.</p>	
<p>Kesiapan Bupati Rina di periksa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait aliran dana GLA dan bantahan Bupati Rina jangan politisasi penyusutan kasus tuntas GLA menjadi hal yang penting dalam pemberitaan kali ini. Meskipun membantah namun pemeriksaan kesiapan Bupati Rina ditegaskan dalam berita ini.</p>			

**Analisis Peristiwa Kasus Dugaan Korupsi Perumahan Griya Lawu Asri yang melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani di Surat Kabar Harian SOLOPOS, Edisi tanggal 3 Agustus 2010, “Kasus dugaan korupsi GLA. Jumpa pers, Rina banyak diam”**

SKRIP	TEMATIK	SINTAKSIS	RETORIS
<p>SOLOPOS mengangkat berita tentang Klarifikasi dakwaan jaksa JPU kasus dugaan korupsi Griya Lawu Asri</p> <p>Narasumber yang dipilih dalam berita ini yakni, Bupati Karanganyar, Rina Iriani dan Ketua Penasihat hukumnya Warsito Sanyoto.</p> <p>Pelibat: pelibat dalam berita ini adalah Kepala Kesbangpolinmas, Ign Trianto, Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Tatag Prabawanto dan Direktur marketing dan Operasional BPR BKP Karanganyar, Prihanto.</p>	<p>Tema berita yang diangkat dalam berita ini, bantahan dan klarifikasi dari Bupati Rina atas dakwaan JPU kasus dugaan korupsi GLA yang menyebut namanya menerima aliran dana sebesar Rp 18,6 Miliar.</p>	<p>Judul <i>Headline</i>: Jumpa pers, Rina banyak diam.</p> <p><i>Lead</i>: Bupati Karanganyar, Rina Iriani siap mengklarifikasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan korupsi Griya Lawu Asri (GLA) dengan terdakwa Handoko Mulyono yang menyebutkan dirinya menerima dana Rp18,6 Miliar</p> <p>Dari judul dan lead tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan. Mengarahkan pada pembaca untuk membaca lebih ke isi berita.</p> <p>Kutipan dari penasihat hukum</p>	<p>Pemilihan judul dengan jeni dan ukuran font yang jelas dan tegas, mengarahkan pembaca kepada peristiwa yang ingin disajikan dalam berita ini.</p> <p>berita ini disusun dengan pola penulisan deskriptif antara paragraph awal hingga terakhir, terdapat hubungan makna yang mengarahkan kepada tema yang disampaikan pada berita ini.</p> <p>Penggunaan tanda kutip pada kutipan langsung yang ditampilkan menjadi bukti objektifitas apa yang disampaikan SOLOPOS..</p> <p>Penggunaan kata leksikon</p>

<p>Ketua Penasihat hukumnya Warsito Sanyoto menyatakan kliennya belum pernah di periksa Kejaksaan Tinggi Jateng sesuai uraian Jpu dalam siding Handoko Mulyono. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 2-3.</p> <p>Warsito menegaskan kliennya tidak pernah berurusan dengan KSU Sejahtera dan terlalu premature mengatakan bupati Rina terlibat dalam aliran dana GLA. Pragraf ini terletak pada paragraph 4-5.</p> <p>Warsito menyatakan menjunjung tinggi dugaan praduga tak bersalah atas kasus yang menimpa kliennya. Pernyataan tidak langsung ini terdapat pada paragraph 7.</p>		<p>Bupati Rina, Warsito sanyoto yang menegaskan hal tersebut.</p>	<p>“premature” yang berasal dari pernyataan penasihat hukum Bupati Rina, warsito sanyoto memberikan maksud kepada sesuatu yang sangat dipaksakan, dan belum pada waktunya, bisa juga terlalu dini.</p> <p>Penggunaan leksikon “ trial by the press” yang berasal dari pernyataan penasihat hukum Bupati Rina, Warsito Sanyoto yang kalimat itu mempunyai arti pengadilan ,penilaian, atau penghakiman, yang dilakukan pada kliennya dalam penegakan hukum terhadap kasus ini yang belum tentu dilakukan oleh kliennya.</p> <p>Penggunaan unsur grafis. kutipan pernyataan langsung dari penasihat hukum Bupati Rina, Warsito Sanyoto yang diletakkan sejajar pada paragraph awal, dalam bentuk yang lebih ditonjolkan dengan penggunaan ukuran font yang lebih besar dan kombinasi garis dan simbol</p>
--	--	---	---

Bantahan dan klarifikasi dari Bupati Rina atas dakwaan JPU kasus dugaan korupsi GLA yang menyebut namanya menerima aliran dana sebesar Rp 18,6 Miliar melalui penasihat hukumnya Warsito Sanyoto

Penulisan *headline dan lead* tidak ada hubungan satu sama lain, mengajak pembaca untuk melihat isi berita yang ada. Dan bantahan penasehat hukum Warsito Sanyoto menguatkan melalui kutipan yang membantah kliennya terlibat dalam aliran dana GLA.

frame SOLOPOS dalam berita kali ini adalah mengenai bantahan dan klarifikasi Bupati Rina yang disampaikan penasihat hukumnya Warsito Sanyoto terkait dakwaan JPU kasus dugaan korupsi GLA yang menyebut dirinya menerima dana Rp 18,6 Miliar dan seluruh paragraf dari berita ini dituliskan secara deskriptif dan kutipan dari penasehat hukum.

**Analisis Peristiwa Kasus Dugaan Korupsi Perumahan Griya Lawu Asri yang melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani di Surat Kabar Harian SOLOPOS, Edisi tanggal 6 Agustus 2010, Handoko beberkan aliran Rp 370 Juta**

SKRIP	TEMATIK	SINTAKSIS	RETORIS
<p>SOLOPOS dalam berita ini mengangkat tema pembacaan materi eksepsi yang disampaikan tim penasihat hukum Handoko Mulyono pada persidangan kedua perkara ini</p> <p>Narasumber yang digunakan dalam berita ini yakni tim penasihat hukum yang terdiri atas Yuri Warmanto, Hilderia Damanik, dan Hastin Dirgantari, terdakwa Handoko Mulyono, Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto., dan JPU.</p> <p>Yuri Warmanto selaku tim penasihat hukum menyebutkan dana digunakan untuk berbagai kepentingan. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 1.</p>	<p>Tema yang diangkat dalam berita ini tentang Handoko Mulyono, Rincian penggunaan dana Rp 370 juta.</p>	<p>Judul <i>headline</i>: Kasus dugaan Korupsi GLA, Handoko beberkan aliran Rp 370 juta</p> <p><i>Lead</i>: Terdakwa kasus dugaan korupsi perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar, Handoko Mulyono, mulai buka mulut. Dari Rp 370 juta lebih yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) mengalir ke dirinya, Handoko mengaku uang itu dipakai untuk berbagai kepentingan termasuk keperluan operasional DPRD Karanganyar senilai Rp 135 juta.</p> <p>Hubungan antara judul dan lead saling berhubungan dan membawa pembaca untuk mengetahui isi</p>	<p>Pemilihan judul pada pokok pemberitaan dan lebih dalam lagi diperjelas dalam <i>lead</i> menunjukkan penekanan pemberitaan kali ini pada pernyataan Handoko Mulyono.</p> <p>Penggunaan Lesikon “beberkan” memberikan penekanan pada fakta peristiwa mengenai terdakwa Handoko Mulyono. Kata “beberkan” mempunyai kata lain “mengungkapkan” atau juga “membuka” yang lebih mengarah pada kata rahasia atau membongkar rahasia.</p> <p>Elemen grafis juga muncul dalam bentuk foto, dalam hal ini Handoko Mulyono. Elemen grafis ini</p>

<p>Yuri Warmanto juga menyatakan dakwaan Handoko Mulyono yang disusun JPU tidak memperkaya diri sendiri tapi untuk berbagai pihak. Paragraf ini terdapat pada paragraf 3.</p> <p>Selain itu Yuri juga pengeluaran dana adanya kuitansi sebagai tanda bukti. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 4</p> <p>Terdakwa Handoko Mulyono menyatakan dana yang didakwaan JPU sebesar 370 juta diberikan atas perintah Tony Haryono. Pernyataan tidak langsung ini terdapat pada paragraf 5.</p> <p>“Semua dengan perintah dan atas sepengetahuan Pak Tony. Saya dalam hal ini hanya menjalankan tugas dari yang bersangkutan sebagai Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera,” ujar Handoko ketika dicegat wartawan sesuai proses persidangan. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 6.</p>		<p>berita yang disediakan .</p>	<p>semakin memberikan penekanan pada berita kali ini bahwa pemberitaan terfokus pada pernyataan terdakwa kasus dugaan korupsi dana perumahan Griya Lawu Asri.</p> <p>Unsur grafis gambar tangan berlimpah uang menggambarkan pada pernyataan Handoko Mulyono membeberkan mengenai aliran dana dugaan korupsi yang diperuntukan kepada pribadi/perorangan.</p> <p>Table rincian penggunaan dana Rp 300 juta sebagai unsur grafis memberikan penekanan fakta yang ingin disampaikan SOLOPOS.</p>
--	--	---------------------------------	--

Sementara itu Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, tidak membantah dan tidak membenarkan perihal dugaan aliran dana Rp 135 juta dari Handoko guna operasional DPRD. “Kalau memberi uang DPRD, lalu siapa yang menerima? Di Karanganyar kan ada 45 anggota DPRD,” ujarnya singkat saat dimintai konfirmasi melalui telepon genggamnya. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 10.

Penasihat hukum Handoko Mulyono dalam eksepsi atau keberatannya menyatakan penyampaian turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada tersangka atau kuasa hukumnya telah melanggar Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Hal itu karena turunan surat dakwaan yang seharusnya diterima bersamaan waktunya dengan saat pelimpahan ke pengadilan. Pernyataan ini terdapat pada paragraf 11.

<p>Keterangan para saksi dalam persidangan yang menyebutkn aliran dana GLA yang digunakan oleh berbagai pihak untuk beberapa kepentingan. Dari pemilihan narasumber, Penasehat Handoko Mulyono dipilih oleh SOLOPOS sebagai pihak yang membela Handoko Mulyono.</p>	<p>Penekanan terlihat dari judul yang menjadi headline, kata-kata yang digunakan oleh wartawan seolah ingin menonjolkan aliran dana yang diungkapkan oleh Handoko Mulyono, dengan didukung oleh grafis dan juga foto.</p>
<p>Frame yang digunakan SOLOPOS dalam berita kali ini SOLOPOS memberitakan tentang pengakuan terdakwa Handoko Mulyono terhadap aliran dana yang mengalir diberbagai pihak, dengan memberikan kesaksian dari sejumlah narasumber yang terkitab dakam kasus GLA tersebut. Terlihat dalam pemberitaannya lebih meny eroti dan menonjolkan temuan fakta yang yang di informasikan dari narasumber yang terlibat aliran dana GLA.</p>	

**DATA NARASUMBER:**

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan/ pekerjaan :
3. TTL :
4. Jenis Kelamin :
5. Hobby :
6. Agama :
7. Status Perkawinan :
8. Jumlah anak :
9. Suku :
10. Kota Asal :
11. Alamat Rumah :
12. Tlp\HP :
13. Masuk SOLOPOS sejak :
14. Sejarah Pendidikan  
Perguruan Tinggi :
15. Sejarah Pekerjaan  
Tahun Pekerjaan :

### **Pertanyaan untuk Pemimpin Redaksi**

1. Apa visi dan misi SOLOPOS, dan bagaimana implementasinya di lapangan?
2. Apakah SOLOPOS memiliki kolom khusus seputar korupsi? dan bagaimana *SOLOPOS* menempatkan berita korupsi?
3. Setiap sore tentunya ada rapat redaksi, apakah redaksi memberikan arahan kepada redaktur dan wartawan?
4. Kalau mekanisme redaksional SOLOPOS yang bertugas menentukan isu pemberitaan siapa?
5. Kalau obyektivitasnya seperti apa di SOLOPOS?
6. Landasan jurnalisme yang diusung SOLOPOS dalam peliputan seperti apa?
7. Terkait kebijakan pemberitaannya?
8. Untuk divisi perusahaan dan divisi redaksi harus saling tidak terikat satu sama lain ?
9. Tidak terpengaruh sama sekali pak, karena sesuatu hal divisi perusahaan bisa mengintervensi redaksi?
10. Hubungan profesionalitas seperti apa di SOLOPOS?
11. Bagaimana sistem kerja di SOLOPOS?
12. Apa motto dan ideologi kerja di SOLOPOS? dan penerapan untuk reporter dan redaktur?
13. Apakah hubungan kerja sama itu mempengaruhi ideology dan motto di SOLOPOS khususnya pemerintah daerah?
14. Apakah para pengiklan turut mempengaruhi ideology dan pola kerja dari SOLOPOS sendiri?
15. Apakah hal terpenting yang selalu anda ingatkan dan tekankan pada wartawan dan redaktur di SKH SOLOPOS?
16. Apa kiat-kiat anda dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut?

**Pertanyaan yang berkaitan dengan kasus GLA dan keterlibatann Pejabat penting di Karanganyar**

1. Bagaimana pendapat pribadi anda mengenai kasus GLA dan keterlibatan salah satu pejabat? Seberapa penting isu tersebut bagi SOLOPOS?
2. Dan tujuan yang ingin dicapai SOLOPOS dalam pemberitaan GLA?
3. Dan bagaimana menurut anda peran media dalam menyampaikan kasus korupsi di masyarakat ?
4. Bagaimana sikap SOLOPOS dalam menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini, khususnya kasus yang melibatkan pejabat penting di Karanganyar?
5. Dalam kaitannya pers sebagai diskusi publik, bagaimana membatasi peliputan supaya tidak terkesan memihak?
6. Kesimpulan dan kebijakan redaksi dalam pemberitaan GLA dan keterlibatan pejabat penting di Karanganyar?

## DATA NARASUMBER

### REDAKTUR PELAKSANA SURAT HARIAN SOLOPOS

1. Nama Lengkap : Anton Wahyu Prihartono
2. Jabatan/ pekerjaan : Redaktur Pelaksana / Jurnalis
3. TTL : Sleman, 12 April 1977
4. Jenis Kelamin : Laki- laki
5. Hobby :
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Menikah
8. Jumlah anak : 2
9. Suku : Jawa
10. Kota Asal : Sleman
11. Alamat Rumah : Perum Jetis Permai gang 8/ 30  
Gentan SSukoharjo
12. Tlp\HP : 081393099099
13. Masuk SOLOPOS sejak : Juni 2000
14. Sejarah Pendidikan
  - TK : ABA Sleman
  - SD : SD Ngino I 1983-1989
  - SLTP : SMP Tridadi 1989-1992
  - SMU : SMA 2 Yk 1992-1995
  - Perguruan Tinggi : Komunikasi UNS 1995-2000
15. Sejarah Pekerjaan


Tahun	Pekerjaan
2000	Reporter
2004	Redaktur Muda
2006	Redaktur
2009-sekarang	Redaktur Pelaksana

## **Wawancara dengan Anton Wahyu Prihartono**

### **Redaktur Pelaksana Solopos**

**Rabu, 13 Mei 2011 pukul 13.00-14.30 WIB,**

**di Kantor SOLOPOS**

**1. Apa visi dan misi SOLOPOS, dan bagaimana implementasinya di lapangan ?**

*Jawab : Visi SOLOPOS adalah sebagai Penyaji informasi utama, terpercaya dengan pengelolaan usaha yang professional, sedangkan Misi dari SOLOPOS membentuk sumber daya manusia yang berkompeten dan bermoral, menyajikan informasi yang berimbang, akurat dan unggul dan mensejahterakan stakeholders SOLOPOS. Dan SOLOPOS sebagai industri pers di Indonesia selain memberikan informasi juga memberikan edukasi pada masyarakat, dan sebagai general juga sebagai control di lembaga- lembaga perwakilan rakyat, pemerintah dan juga masyarakat. Ketiga ini kami usung di SOLOPOS. Implementasi dilapangan, kami selalu menekankan reporter dilapangan harus menyajikan berita yang disediakan harus akurat, berimbang dan balance dan tidak memberikan keresahan pada masyarakat. Kami menghindari berita bombatis Cuma untuk menggaet pembaca namun isinya tidak sesuai dengan fakta dan rekayasa. Hal selalu disampaikan dan tekankan pada wartawan dilapangan. SOLOPOS memberikan sesuatu yang sesuai fakta.*

**2. Apakah SOLOPOS memiliki kolom khusus seputar korupsi ? dan bagaimana SOLOPOS menempatkan berita korupsi?**

*Jawab : ya.. terkait dengan visi SOLOPOS sebagai media kontrol sosial, bahwa korupsi merupakan suatu isu yang menarik yang disikapi, bahwa SOLOPOS memiliki dan selalu membahas tentang korupsi khususnya di daerah lokal (Surakarta sekitarnya). **Kami konsen terhadap berita korupsi** karena sangat menarik untuk disampaikan pada masyarakat, agar masyarakat tahu bagaimana korupsi yang ada di daerahnya. Selain daerah, korupsi pusat juga kami tampilkan. Kami punya tanggung jawab sosial dalam menyampaikan berita korupsi kepada masyarakat, karena Negara ini ambruk dengan adanya korupsi, dan kami sebagai media memiliki peran menyampaikan pada masyarakat. Berita korupsi yang kami tampilkan berdasarkan fakta yang ada dilapangan.*

**3. Setiap sore tentunya ada rapat redaksi, apakah redaksi memberikan arahan kepada redaktur dan wartawan ?**

*jawab : rapat redaksi dilakukan setiap hari selama 2 kali, jam 3 untuk evaluasi koran terbit hari ini dan jam 18.30 budgeting berita untuk besok harinya dan menentukan HL dan bermacam perkembangan berita terakhir. Kemudian untuk perkembangan isu dibahas juga di rapat redaksi, evaluasi ini disampaikan nantinya oleh redaktur ke reporter bagaimana perkembangan berita yang harus dilakukan.*

**4. Kalau mekanisme redaksional SOLOPOS yang bertugas menentukan isu pemberitaan siapa?**

*Jawab: kami punya standar dalam menyampaikan berita harus memiliki beberapa unsur seperti prominence, magnitude, signature, kedekatan, ketenaran. Kami menyampaikan berita korupsi yang sesuai dengan jangkauan SOLOPOS. SOLOPOS menyampaikan berita korupsi yang penting bagi masyarakat. parameter sesuai dengan kedekatan pembaca SOLOPOS. Misalnya : bahwa wakil rakyat yang anda pilih di Surakarta mengalami korupsi, adanya kedekatan dengan pembaca karena SOLOPOS berada di Surakarta. Secara struktural ya pemred tentunya tetapi tidak mutlak kadang saya sebagai redpel, atau masukan teman-teman rapat lainnya : seperti redaktur, pemred, wampemred, redpel. Misalnya HL, menentukan mana yang menjadi HL harus berdasar kesepakatan rapat redaksi, walaupun pemred punya wewenang dalam menentukan.*

**5. Kalau obyektivitasnya seperti apa di SOLOPOS?**

*Jawab : sebisa kami sesuai dengan prinsip jurnalistis bahwa kami tidak bisa menurunkan kalo tidak sesuai fakta dan belum ada konfirmasi, dalam artian tidak sepihak. Prinsip balance wajib kita lakukan.*

**6. Landasan jurnalisme yang diusung SOLOPOS dalam peliputan seperti apa?**

*Jawab: berita berimbang, berimbang dan akurat dan membela kepentingan rakyat yang benar, bukan berarti menentang pemerintah terus. Tidak selalu bad news is good news. Tidak semua berita SOLOPOS jelek semua, itu yang ditekankan oleh reporter dilapangan. Kalau pemerintah bagus ya kita angkat, kalo jelek ya kita tulis apa adanya sesuai fakta. Kita boleh mengeritik tapi juga harus berimbang tidak harus berita yang negative. Kami selalu berpegang tidak selamanya bad news itu good news. Bahwa landasan jurnalisme yang diusung solopos bahwa kewajiban pertama jurnalisme adalah untuk kebenaran, loyalitas*

*pertamanya adalah kepada warga. Dalam menyampaikan berita harus menerapkan disiplin verifikasi sehingga berita yang diturunkan harus benar-benar clear.*

*Wartawan solopos harus benar-benar independen dan tidak boleh terlibat dalam partai politik manapun. Dengan demikian, para jurnalis solopos bisa menyajikan berita seobjektif mungkin termasuk dalam melakukan control (pemantau kekuasaan).*

*Selain itu, berita yang disajikan wartawan membuat berita yang signifikan, menarik, dan relevan dengan tetap menjaga berita komprehensif dan proporsional.*

**7. Terkait kebijakan pemberitaannya ?**

*Jawab: Sebagaimana saya sampaikan dalam pertanyaan nomor 6, bahwa berita yang ditulis harus akurat, balance dan clear. Dalam menjalankan liputan, wartawan solopos harus tetap mengacu pada kode etik jurnalistik. Dan dari lahir, solopos mengharamkan amplop. Wartawan dilarang menerima imbalan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Tentu saja, ada beberapa kriteria bagaimana berita itu bisa dimuat seperti proximity, prominent, timeless dll.*

**8. Untuk divisi perusahaan dan divisi redaksi harus saling tidak terikat satu sama lain ?**

*Jawab : o iya terpisah harus terpisah walaupun masih dalam satu perusahaan yang sama. Karena pemberitaan ada independent sendiri.*

**9. Tidak terpengaruh sama sekali pak, karena sesuatu hal divisi perusahaan bisa mengintervensi redaksi ?**

*Jawab : bisa jadi.. kalo intervensi ya ga bisa saling mengintervensi, misalnya iklan karena saya memegang iklan besar anda jangan muat ini.. ya ga bisa, hal itu pernah terjadi, yang terpenting informasi yang ada harus berguna untuk masyarakat. Institusi pers seperti ini sekarang sudah menjadi industri, industri pers, ada idealisme yang diangkut redaksi dan bisnis untuk menghidupi agar bisa berjalan. Tetapi antara keduanya tidak bisa dicampur. Kalo bisa saling bantu antara iklan dan redaksi akan dibantu, asal yang disampaikan sesuai dengan etika jurnalis, informatif dan berguna bagi pembaca.*

**10. Hubungan profesionalitas seperti apa di SOLOPOS?**

*Jawab: harus profesional, makanya sesuai yang disampaikan visinya antara informasi dan usaha itu terkait, tidak boleh mempengaruhi . kalo*

*iklan layak dimuat maka akan dimuat, dan pastinya akan saling membantu.*

**11. Bagaimana sistem kerja di SOLOPOS?**

*Jawab: seorang reporter harus stand by 24 jam dan tentukan istirahat sendiri. Kita sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang reporter, redaktur. Sebagai seorang reporter harus tahu apa yang terjadi dilapangan. Diawal masuk sebagai seorang jurnalis atau reporter suatu kerja yang sangat berat dibanding dengan pekerjaan yang lain karena harus stand by 24 jam*

**12. Apa motto dan ideologi kerja di SOLOPOS? dan penerapan untuk reporter dan redaktur?**

*Jawab: meningkatkan dinamika masyarakat, sebagai fungsi media harus tahu bagaimana membangun dan membangkitkan menuju yang lebih baik untuk kota Surakarta maupun karisidenan. dan sesuai dengan visi misi yang sudah saya sampaikan diatas, menjadi media yang akurat, berimbang dan balance. Sebagai koran utama, kami ingin menyampaikan berita- berita peristiwa di surakarta dan sekitarnya dengan cepat tidak ditunda-tunda dihari berikutnya.*

**13. Apakah hubungan kerja sama itu mempengaruhi ideology dan motto di SOLOPOS khususnya pemerintah daerah?**

*Jawab: sebagai media patner pemerintah, dan kontrol pemerintah kami selalu menjalin kerja sama baik dengan melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah misalnya penanaman pohon dan CSR lainnya. Adakalanya kami mengeritik pemerintah ada kalanya memberikan sumbangsih dengan adanya kegiatan pemerintah untuk disampaikan masyarakat.*

**14. Apakah para pengiklan turut mempengaruhi ideology dan pola kerja dari SOLOPOS sendiri ?**

*Jawab: kami berusaha independent dan prinsip idealis. Tidak semua materi yang diterima dimuat didalam koran. Jika bermanfaat ya kami muat kalo tidak ya tidak, tidak ada jaminan jika mengiklan di SOLOPOS maka berita dimuat. Apalagi pemerintah daerah. Tidak ada jaminan para pengiklan bisa dimuat beritanya. Asal bermanfaat dan mengandung unsur informasi akan kami muat. Tetap pada prinsip kami tadi akurat, balance dan berimbang.*

**15. Apakah hal terpenting yang selalu anda ingatkan dan tekankan pada wartawan dan redaktur di SKH SOLOPOS?**

*Jawab: menulis berita berdasarkan dan sesuai fakta di lapangan dan harus ada konfirmasi dari pihak yang terkait. Selain itu juga tidak diperkenankan menerima amplop.*

**16. Apa kiat-kiat anda dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut ?**

*Jawab: sebagai media leader, kami jadi tahu kekurangan kami dibanding media koran lainnya. Yang penting bersaing secara sehat. Kalo tidak ada kompetitor, kami bisa evaluasi. kami jadi bisa membuat berita benar yang diinginkan oleh masyarakat. Kami selalu melakukan evaluasi dari kekurangan yang ada, apa yang ditambahkan dibanding media lain yang ada.*

**Pertanyaan yang berkaitan dengan kasus GLA dan keterlibatann Pejabat penting di Karanganyar**

**1. Bagaimana pendapat pribadi anda mengenai kasus GLA dan keterlibatan salah satu pejabat ?Seberapa penting isu tersebut bagi SOLOPOS?**

*Jawab:ya .. GLA merupakan salah satu potret dugaan korupsi di soloraya, yaitu karanganyar. Kami sangat konsen, karena gla masuk untuk masyarakat menengah bawah. Sangat ironi, sudah menengah kebawah terkena korban korupsi orang tersebut. kami terus mengawal sampai akhir sidang salah satu terdakwa walaupun sidang di semarang. Berita ini menarik karena diduga kuat orang dan pejabat di Karanganyar, dan kami masih memegang normatif. Pesan moral kami : kalo terjadi pada pejacat ya harus di bongkar dan dituntaskan, karena menyangkut masyarakat kecil yang tertimpa. Siapa saja yang terlibat harus dibongkar dan kami akan mendorong membantu untuk menuntaskan dalam memuat berita.*

**2. Dan tujuan yang ingin dicapai SOLOPOS daalam pemberitaan GLA?**

*Jawab: Tugas utama jurnalisme adalah mendidik, memberi tahu dan menghibur. Selain ketiga hal itu, ada misi idealisme yang kami jalankan sebagai media kontrol baik itu pemerintah dan masyarakat. Korupsi merupakan suatu isu yang sering menjadi perhatian bagi solopos, termasuk GLA. Solopos hanya menyajikan adanya fakta telah terjadi praktik dugaan korupsi dalam proyek GLA. Dalam kasus tersebut kami*

*ingin memberikan gambaran yang jelas mengenai siapa yang terlibat dalam kasus yang telah merugikan rakyat kecil tersebut. Kami konsisten mengawal kasus itu sesuai dengan fakta hukum yang ada dan tetap mengacu pada prinsip keberimbangan. Kami ingin mendorong agar kasus itu bisa diselesaikan secara tuntas dan seadil-adilnya. Dari kasus tersebut, agar pembaca tahu siapa dalang atau orang yang bertanggung jawab dalam mega proyek tersebut, Kami ingin hukum benar-benar ditegakkan dalam kasus ini.*

**3. Dan bagaimana menurut anda peran media dalam menyampaikan kasus korupsi di masyarakat ?**

*Jawab : media sangat efektif turut meniptakan pemerintahan yang bersih, tanpa media pembrantasan korupsi tidak cepat, karena media salah satu penyalur aspirasi masyarakat untuk mendesak segera dituntaskan kasus korupsi tersebut. Peran media sangat strategis dalam membantu menyelesaikan.*

**4. Bagaimana sikap SOLOPOS dalam menghadapi peristiwa- peristiwa seperti ini , khususnya kasus yang melibatkan pejabat penting di Karanganyar?**

*Jawab: karena melibatkan salah satu pejabat penting di karanganyar, harus di usut apakah terlibat atau tidak. Semua saksi mengarah pada pejabat tersebut, dari saksi di konfirmasi. Kami memegang sesuai fakta dan praduga tidak bersalah.*

**5. Dalam kaitannya pers sebagai diskusi public, bagaimana membatasi peliputan supaya tidak terkesan memihak?**

*Jawab: ya kita netral saja, berita yang kami muat berdasarkan fakta yang ada dilapangan, tidak di rekayasa atau dibuat- buat.*

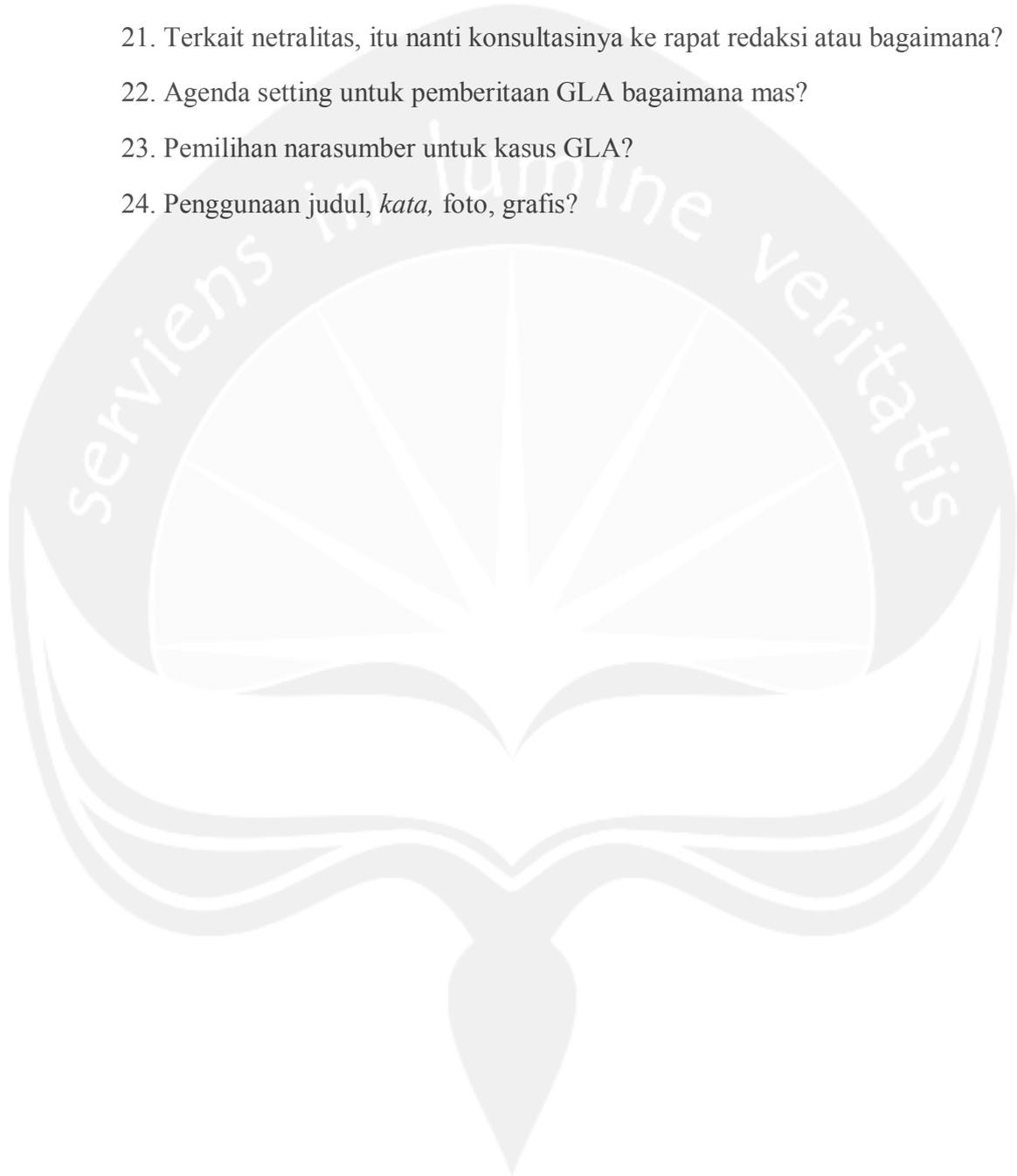
**6. Kesimpulan dan kebijakan redaksi dalam pemberitaan GLA dan keterlibatan pejabat penting di Karanganyar?**

*Jawab : kasus ini dituntaskan secara adil-adilnya, apabila menyangkut pejabat- pejabat yang terlibat yang menurut saksi ada aktor- aktor yang terlibat ya harus diselesaikan sesuai dari keterangan saksi dalam sidang GLA kemarin. Kami akan mendorong sesuai dengan fakta yang sesuai disampaikan saksi GLA. Dibongkar seadil-adilnya, dan kami akan menyampaikan secara berimbang dan adil dengan melakukan konfirmasi.*

## **Pertanyaan untuk Redaktur Wilayah Karanganyar**

1. Bagaimana anda bergabung dengan SOLOPOS?
2. Mengapa anda memilih SOLOPOS sebagai tempat berkarir anda?
3. Apa pendapat anda tentang kinerja dan sinergi kerja yang terjadi di SOLOPOS?
4. Apa moto dari SOLOPOS? Apakah anda terapkan dalam menjalankan tugas anda sebagai redaktur di SOLOPOS?
5. Adakah ideology SOLOPOS yang anda terapkan dan ditanamkan dalam benak anda sebagai pekerjanya? Ideology seperti apa dan apakah anda setuju dengan ideology tersebut ?
6. Menurut anda, hal apa yang membuat anda bangga menjadi salah satu bagian dari SOLOPOS?
7. Menurut anda, bagaimana SOLOPOS menyikapi kasus dugaan korupsi perumahan GLA dan keterlibatan Rina iriani? (mengingat SOLOPOS merupakan salah satu surat kabar lokal yang ada di SOLO)
8. Bagaimana prosedur dan criteria yang dipakai dalam menentukan berita GLA layak terbit?
9. Menurut anda bagaimana respon masyarakat terhadap pemberitaan ini ?
10. Menurut anda hambatan dan tantangan bagi SOLOPOS sebagai salah satu media lokal di Surakarta dan sekitarnya?
11. Bagaimana pendapat anda mengenai kasus GLA dan keterlibatan Rina Iriani ?
12. Menurut anda, kasus ini masuk dalam kategori apa ?
13. Korupsi bukan satu kali ini saja yang menjerat dan dilakukan pejabat pemerintahan, apa pendapat anda mengenai hal ini ?
14. Dan bagaimana menurut anda peran media dalam menyampaikan kasus korupsi di masyarakat ?
15. Bagaimana sikap SOLOPOS dalam menghadapi peristiwa- peristiwa seperti ini , khususnya kasus yang melibatkan orang no . 1 suatu daerah ?
16. Kebijakan redaksional dalam mengatur kasus korupsi ini ?
17. Kalau masalah parameter, bagaimana penyaringan isunya mas?
18. Terkait penyaringan isu, yang mengelola isu dan memutuskan siapa?

19. Termasuk agenda settingnya?
20. Mekanisme redaksional SOLOPOS yang berwenang mengambil keputusan redaksi atau siapa?
21. Terkait netralitas, itu nanti konsultasinya ke rapat redaksi atau bagaimana?
22. Agenda setting untuk pemberitaan GLA bagaimana mas?
23. Pemilihan narasumber untuk kasus GLA?
24. Penggunaan judul, *kata*, foto, grafis?



## DATA NARASUMBER

### REDAKTUR SOLOPOS BAGIAN WILAYAH

#### KABUPATEN KARANGANYAR

1. Nama Lengkap : Yonantha Chandra Premana
2. Jabatan/ pekerjaan : Wartawan
3. TTL : Pekalongan 28 Juli 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Hobby : Internetan
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Menikah
8. Jumlah anak : 2
9. Suku : Jawa
10. Kota Asal : Pekalongan
11. Alamat Rumah : Pondok baru Permai II/46 Purbayan  
Baki Skhj
12. Tlp\HP : 081329396627
13. Masuk SOLOPOS sejak : tahun 2000
14. Sejarah Pendidikan : S1 FISIP UNS  
Perguruan Tinggi
15. Sejarah Pekerjaan :  
Tahun Pekerjaan  
2000- Sekarang Redaktur SOLOPOS

## **Wawancara dengan Yonantha Chandra Premana**

### **Redaktur Solopos wilayah Karanganyar**

**Rabu, 3 Mei 2011 pukul 13.00-14.30 WIB, di Kantor SOLOPOS**

**1. Bagaimana anda bergabung dengan SOLOPOS?**

*Jawab : saya bergabung di SOLOPOS sejak tahun 2009*

**2. Mengapa anda memilih SOLOPOS sebagai tempat berkarir anda?**

*Jawab: saya memilih di SOLOPOS, awalnya hanya ga mau hanya kuliah saja tapi ingin mencari pengalaman. Selain itu juga SOLOPOS sebagai Koran lokal di Solo mempunyai kekuatan dibanding media lokal yang lain.*

**3. Apa pendapat anda tentang kinerja dan sinergi kerja yang terjadi di SOLOPOS?**

*Jawab : kinerja dan sinergi kerja baik antara reporter dan redaktur berjalan baik. Meski setiap hari tidak diharuskan ke kantor tapi selalu ada koordinasi bersama melalui sms, telpon dan lain sebagainya. Dan juga Prinsip dasar meningkatkan dinamika masyarakat, bikin berita ga boleh ngawur dan berperpihakan masyarakat. Setiap berita harus dikonfirmasi dan harus balance dari pihak yang bersangkutan*

**4. Apa moto dari SOLOPOS? Apakah anda terapkan dalam menjalankan tugas anda sebagai redaktur di SOLOPOS?**

*Jawab : Meningkatkan dinamika masyarakat, penyaji informasi terpercaya pada masyarakat. Beritanya harus bagus dan positif yang bisa disajikan pada masyarakat.*

**5. Adakah ideology SOLOPOS yang anda terapkan dan ditanamkan dalam benak anda sebagai pekerjanya? Ideology seperti apa dan apakah anda setuju dengan ideology tersebut ?**

*Jawab : Menyajikan informasi terpercaya, menjadi pihak yang terprovokasi dengan pihak lain, dan tidak menerima amplop. Dan aku setuju dengan wartawan tidak menerima amplop dan harus di jujur dalam menulis berita. Seperti contohnya Ditemui wartawan- itu kelapangan, dan kepada ekspos - via telpon*

**6. Menurut anda, hal apa yang membuat anda bangga menjadi salah satu bagian dari SOLOPOS?**

*Jawab: bangga karena sebagai media leader di surakarta dapat bergabung di media ini dan berusaha memberikan yang terbaik melalui SOLOPOS.*

**7. Menurut anda, bagaimana SOLOPOS menyikapi kasus dugaan korupsi perumahan GLA dan keterlibatan Rina iriani ?( mengingat SOLOPOS merupakan salah satu surat kabar lokal yang ada di SOLO?)**

*Jawab: prinsipnya pertama karena kita berperpihakan pada public, dan awalnya Rina begitu getol menyampaikan program untuk masyarakat miskin dan mengundang SBY dalam programnya, dan saat ini proyek ini terhenti kenapa proyek ini terhenti karena menyangkut banyak orang, dan kita sebagai media lokal harus mencari fakta dan berimbang untuk menghindari kesalahan menulis berita apalagi berita GLA yang sangat sensitif. Setiap mengangkat GLA menjadi headline Bupati Rina selalu memberi marah dan menelpon ke redaksi.hingga kini kasus masih bergulir. Keterlibatan Rina dalam berita ini, semua saksi dalam sidang selalu menyebutkan Bupati Rina ikut andil dalam kasus ini dengan sejumlah dana yang masuk kepadanya, tapi hingga sekarang belum ada tindak keterlibatan.*

**8. Bagaimana prosedur dan criteria yang dipakai dalam menentukan berita GLA layak terbit?**

*Jawab: orang yang bersalah harus dihukum begitu juga sebaliknya, dan SOLOPOS, Dan menulis GLA harus berimbang. Setiap ada berita yang menyebutkan narasumber harus di konfirmasi kepada pihak berwenang.*

**9. Menurut anda bagaimana respon masyarakat terhadap pemberitaan ini ?**

*Jawab : Respon banyak sekali di solopos.com dan juga kring SOLOPOS, dan mendapat dukungan untuk terus mengikuti kasus GLA.*

**10. Menurut anda hambatan dan tantangan bagi SOLOPOS sebagai salah satu media lokal di Surakarta dan sekitarnya?**

*Jawab: hambatan selama ini belum ada, karena kita selalu menulis berimbang, apalagi dalam berita GLA, setiap narasumber yang disebutkan akan selalu kita konfirmasi, termasuk dalam penyebutan Bupati Rina, kita akan memberi jawab kepada Rina.*

**11. Bagaimana pendapat anda mengenai kasus GLA dan keterlibatan Rina Iriani ?**

*Jawab: Bupati Rina sebaiknya diperiksa pembuktian dia bersalah atau tidak agar tidak memunculkan rumor di masyarakat.*

**12. Menurut anda, kasus ini masuk dalam kategori apa ?**

*Jawab: korupsi karena menyangkut penyalahgunaan wewenang dan penggunaan untuk memperkaya diri sendiri.*

**13. Korupsi bukan satu kali ini saja yang menjerat dan dilakukan pejabat pemerintahan, apa pendapat anda mengenai hal ini ?**

*Jawab : pejabat harus lebih pintar, karena efeknya ga enak juga banyaknya kasus ini, mala mereka tidak berani membuat program.*

**14. Dan bagaimana menurut anda peran media dalam menyampaikan kasus korupsi di masyarakat ?**

*Jawab : penting banget, apalagi GLA masyarakat pengen tahu apalagi yang menyangkut orang besar dan membantu masyarakat bagaimana melihat kasus ini, bisa dan melihat kejadian tersebut segera melapor.*

**15. Bagaimana sikap SOLOPOS dalam menghadapi peristiwa- peristiwa seperti ini , khususnya kasus yang melibatkan orang no . 1 suatu daerah ?**

*Jawab: SOLOPOS mementingkan kepentingan publik dan memberian suatu kebenaran dalam bentuk apapun apalagi dalam kasus GLA ini SOLOPOS memberikan sesuatu fakta walaupun menyangkut nama orang besar disuatu daerah.*

**16. kebijakan redaksional dalam mengatur kasus korupsi ini ?**

*Jawab : Akurat, jelas dan balance. akurat harus sesuai fakta dilapangan tidak boleh salah karena hal itu sensitive. Jelas data harus sesuai dengan yang ada, Dan harus balance setiap narasumber yang terlibat dalam kasus tersebut. Misalnya penyebutan dana dialirkan kepada sejumlah parpol dikaranganyar, jadi mau ga mau redaksi menelpon semua parpol dilapangan*

**17. kalau masalah parameter, bagaimana penyaringan isunya mas?**

*Jawab: Dalam penyaringan isu kita harus konfirmasi ke pihak yang bersangkutan dan tidak sembarangan dan harus berhati- hati, walaupun*

*dari LSM. Kita harus melihat agenda apa yang diinformasikan kepada redaksi*

**18. Terkait penyaringan isu, yang mengelola isu dan memutuskan siapa?**

*Jawab: dalam penyaringan isu yang menentukan redaktur tapi bila saya bingung dikonsultasikan dan dilempar ke rapat redaksi atau atasan kita yang dilakkan setiap hari setiap jam 3-4 yang melakukan evaluasi dan pemetaan nanti, dan jam 18.30 budgetin pemberitaan untuk besoknya mana yang masuk halaman pertama dan yang lainnya*

**19. Termasuk agenda settingnya?**

*Jawab: itu sama saja dengan TOR seperti membuat makalah atau paper, kita ada outlinenya, kita mungkin tidak tertulis juga bisa seperti sharing redaktur dengan reporter. Mau dibawa kemana setiap isu dari latar belakang sampai pemilihan narasumber*

**20. Mekanisme redaksional SOLOPOS yang berwenang mengambil keputusan redaksi atau siapa?**

*Jawab: Rapat redaksi semua berita di bahas bersama mana yang masuk halaman pertama dan juga HL dan kadang berdebat.dalam menentukan tersebut. Tetapi redaktur juga punya wewenang untuk memutuskan termasuk output beritanya seperti apa.*

**21. Terkait netralitas, itu nanti konsultasinya ke rapat redaksi atau bagaimana?**

*Jawab: ya biasanya itu kalau untuk halaman depan kita rapat, alo HL halaman dapat bisa mungkin dirapatkan, kalau enggak ya dari redaktur punya wewennag untuk memutuskan. Kalau memang dia merasa enggak yakin keatasan atau redpel, wapemred, pemred, ada beberapa jalur.*

**22. Agenda setting untuk pemberitaan GLA bagaimana mas?**

*Jawab; sidang lebih galak , narasumber yang dihubungi inisiatif dari wartawan dan ada masukkan wartwan . penentuan judul dari wartwan tapi redaktur bisa merubah apalagi apabila masuk dalam HL.Pertimbangan judul menarik dan ingin membaca.*

**23. Pemilihan narasumber untuk kasus GLA?**

*Jawaban: wartawan mempunyai inisiatif sendiri dalam menentukan narasumber tapi juga ada penambahan dari redaktur jika diperlukan.*

#### **24. Penggunaan judul, kata, foto, grafis?**

*Jawab : judul bisa diambil dari wartawan, tapi kalau di HL atau halaman pertama melalui rapat redaksi. Tapi jika tidak di halaman pertama redaktur yang menentukan. Penjudulan kita bukan yang bombatis dan wah...hiperbolik. Lebih ke konservatif dan santun sesuai dengan kenyataan. Contoh Dan pemilihan kata “ beberkan “ dia mengeluarkan sesuai yang ada.foto : kalo menarik dipasang ... dan juga tabel sebisa mungkin karena pembaca lebih menyukai seperti itu . berita tidak perlu panjang-panjang. Penggunaan kutipan judul untuk menguatkan dalam berita.*



### **Pertanyaan Wawancara Wartawan:**

1. Karakter pemberitaan SOLOPOS menurut mas seperti apa? Terkait dengan prinsip- prinsip pemberitaann yang diusung SOLOPOS? Bagaimana obyektifitasnya dan kebenarannya?
2. Visi dan misi SOLOPOS, bagaimana penerapannya di lapangan ?
3. Spesifiknya dalam hal apa mas?
4. Artinya untuk kepentingan masyarakat ?
5. Kalau keredaksian SOLOPOS seperti apa, terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan terkait isu pemberitaan ?
6. Keputusan bersama apa ada seseorang yang memiliki wewenang ?
7. Wartawan dilapangan langsung bersinggungan dengan isu dan narasumber, minta penjelasan proses dari isu menjadi berita seperti apa mas?
8. Kemudian terkait dengan pengelolaan isu di lapangan, sikap terhadap isu tersebut berdasarkan apa?
9. Bagaimana dengan sumbernya?
10. Bagaimana kedekatan wartawan dengan narasumber?
11. Factor apa yang menjadi pertimbangan untuk memilih berita yang layak dan yang tidak ?
12. Nilai beritanya seperti apa?
13. Melihat pemberitaan SOLOPOS tentang GLA mengapa SOLOPOS mengambil tema pemberitaan seperti itu ?
14. Pers itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi citra orang perorang, bisa memberikan kesan positif atau sbaliknya?
15. Pertama kali yang memunculkan wacana Rina korupsi siapa?
16. Penetapan rina sebaga salah satu penerima aliran dana dan sudah memiliki keabsahan ?
17. Mohon penjelasan tentang dugaan korupsi yang dilakukan Rina Iriani terhadap GLA?

18. Apa mekanisme control dari redaksi ?
19. Bagaimana pendapat anda mengenai Kasus GLA?
20. Bagaimana keterlibatan Bupati Karanganyar rina iriani terhadap kasus GLA ini ?  
Menurut anda apakah kasus ini sudah masuk dalam kasus tindak korupsi ?  
Menurut anda apa factor terjadinya tindak korupsi ini dan apakah hal ini berpengaruh untuk daerah karanganyar sendiri ?  
Bisakah anda bercerita tentang kasus GLA ? dan pengalaman anda saat meliput kejadian ini ? hal yang menarik, mengerikan ataupun menyenangkan yang terjadi di lapangan saat meliput kejadian ini ?  
Menurut anda siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini ?
21. Bagaimana situasi saat peliputan kejadian tersebut ?
22. Bagaimana prosedur penugasan untuk peliputan kasus korupsi tersebut ?
23. Adakah pembagian tugas antara rekan wartawan sendiri yang dilakukan diluar rapat redaksi ?
24. Persiapan apa yang anda lakukan untuk diri anda sendiri sebelum melakukan tugas peliputan, khususnya peliputan GLA ini? (draft pertanyaan, angle apa yang akan diangkat, narasumber, dll)
25. Apa latar belakang/ alasan/ pertimbangan anda dalam memilih narasumber yang akan dimintai keterangan ?(khususnya dalam kasus GLA)
26. Pertanyaan seputar apa yang disampaikan kepada narasumber tersebut? (pertanyaan yang menjabak, meminta solusi, pendapat pribadi atau bagaimana?)
27. Berdasarkan pengalaman anda, solusi seperti apa untuk kasus ini ?

### **Pertanyaan yang berkaitan dengan SOLOPOS**

1. Bagaimana tahap atau proses sampai anda masuk menjadi wartawan SOLOPOS (melalui interview, tes, dll)
2. Mengapa anda memilih bergabung menjadi wartawan SKH SOLOPOS? Apa pendapat anda mengenai kinerja dan sinergi kerja yang terjadi di SKH SOLOPOS?

3. Apa motto kerja di SOLOPOS? Apakah anda terapkan dalam menjalankan tugas sebagai wartawan ?
4. Adakah ideology dari SOLOPOS yang diterapkan/ditanamkan dalam benak anda sebagai pekerjanya? Ideology seperti apa? Dan setujukah anda dengan ideology itu ?
5. Hal apa yang membuat bangga menjadi salah satu bagian dari SKH SOLOPOS?
6. Menurut anda, bagaimana SOLOPOS menyikapi kasus korupsi perumahan GLA dan keterlibatan Rina iriani dalam pemberitaan ?( mengingat solopos merupakan Koran lokal yng berada di solo)?
7. Adakah larangan / pantangan yang diberikan SOLOPOS saat melakukan tugas peliputan dilapangan ? jika iya seperti apa?
8. Menurut anda, bagaimana sikap dan respon masyarakat terhadap SKH SOLOPOS dalam memberitakan mengenai kasus GLA tersebut ?
9. Apa saran, kritik atau masukan yang anda berikan untuk SOLOPOS? (secara umum dan khusus dalam menghadapi kasus GLA ini ?

## DATA NARASUMBER

### WARTAWAN SOLOPOS

1. Nama Lengkap : Indah Septiyaning Wardani
2. Jabatan/ pekerjaan : Reporter/ Wartawan
3. TTL : Tegal, 5 September 1984
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Hobby : Membaca
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
8. Jumlah anak : 1 ( satu )
9. Suku :
10. Kota Asal : Tegal
11. Alamat Rumah : Crisan Regency aig Ngringo, Jaten  
Karanganyar
12. Tlp\HP : 081578881655
13. Masuk SOLOPOS sejak : Tahun 2005
14. Sejarah Pendidikan : S1 Fisipol UPN “Veteran”  
Perguruan Tinggi Yogyakarta
15. Sejarah Pekerjaan  
Tahun Pekerjaan  
2007- Sekarang Reporter SOLOPOS

## **Wawancara dengan Indah Septiyaning**

**Wartawan Solopos peliput Kasus dugaan Korupsi Perumahan Griya Lawu**

**Asri**

**Bertugas di wilayah Karanganyar**

**Rabu, 27 April 2011 pukul 20.00 WIB, di Pondok Jowi Surakarta**

- 1. Karakter pemberitaan SOLOPOS menurut mas seperti apa? Terkait dengan prinsip- prinsip pemberitaann yang diusung SOLOPOS? Bagaimana obyektifitasnya dan kebenarannya?**

*Jawab : Karakter pemberitaan yang dijalankan SOLOPOS mengedepankan cover both side atau berimbang dalam pemberitaan. Prinsipnya ketika kita melangkah untuk membuat berita harus berimbang artinya ada porsi hak jawab narasumber saat memberitakan sebuah masalah. Selain itu , sebagai konfirmasi pihak yang diberitakan. Berita diangkat berdasarkan fakta dilapangan tidak hanya berita isu.*

- 2. Visi dan misi SOLOPOS, bagaimana penerapannya di lapangan ?**

*Jawab : Visi dan misi SOLOPOS meningkatkan dinamika masyarakat, hubungannya dengan pemberitaan ya memberikan warna terhadap dinamika masyarakat di jawa tengah dan khususnya daerah wilayah Surakarta.*

- 3. Spesifiknya dalam hal apa mas?**

*Jawab : Rubriknya banyak dari ekonomi, pendidikan, politik, budaya, semua dikaitkan ke sana, tujuannya sama.*

- 4. Artinya untuk kepentingan masyarakat ?**

*Jawab : Setiap pemberitaan yang dijalankan tetap berpedoman untuk kepentingan rakyat atau tidak mengabaikan kepentingan rakyat. Informasi yang diberikan mampu membuat pikiran masyarakat lebih terbuka, dinamis dalam menerima informasi.*

- 5. Kalau keredaksian SOLOPOS seperti apa, terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan terkait isu pemberitaan ?**

*Jawab : Di SOLOPOS ada 2 kali rapat, biasanya setiap hari sore jam 2 dan jam 3 rapat, mengenai materi berita yang masuk sementara ada berapa, dan untuk menentukan masuk HL di halaman depan halaman utama. Kemudian rapat kedua jam 7, rapat akhir apakah akan terbit di halaman pertama, apakah ada pengurangan penambahan, bisa saja awalnya berita yang*

*menarik digantikan berita lain yang lebih menarik. Dan kebijakn SOLOPOS secara umum tetap setiap pemberitaan harus coverboth side. Terkait isu pemberitaan biasanya dijalankan oleh masing- masing reporter meskipun terkadang redaktur ikut memberikan pengarahan sebuah isu pemberitaan.*

**6. Keputusan bersama apa ada seseorang yang memiliki wewenang ?**

*Jawab : Keputusan bersama, biasanya melalui rapat redaksi dimana dalam rapat redaksi terdiri dari redaktur, pimpinan redaksi, wapemreda dan redpel. Dimana masing- masing matero yang masuk ke redaktur akan melaporkan.*

**7. Wartawan dilapangan langsung bersinggungan dengan isu dan narasumber, minta penjelasan proses dari isu menjadi berita seperti apa mas?**

*Jawab : Informasi atau isu biasanya diterima dari seseorang bisa berupa narasumber atau teman yang memang menjadi link wartawan. Dari informasi kemudian diolah dan dikonfirmasi kepada narasumber yang bersangkutan untuk kemudian menjadi sebuah berita. Tak kala sebuah isu tersebut berhubung dan harus minta konfirmasi dari pihak bersangkutan sebisa mungkin. Wartawab harus kreatif dalam mengembangkan isu dan mencari isu.*

**8. Kemudian terkait dengan pengelolaan isu di lapangan, pensikapan terhadap isu tersebut berdasarkan apa?**

*Jawab : Isu diambil berdasarkan nilai berita yang ada. Bagaimana isu tersebut memiliki nilai berita yang tinggi. Dan pandai- pandainya wartawan yang bersangkutan untuk mencari berita yang menarik dan layak untuk ditampilkan.*

**9. Bagaimana dengan sumbernya?**

*Narasumbernya bisa dijarang lewat link yang ada, kalo tidak bisa di temui ya lewat telpon kalo itu menarik harus di kejar.*

**10. Bagaimana kedekatan wartawan dengan narasumber?**

*Jawab : Kedekatan wartawan dengan narasumber biasanya tidak terlalu dekat atau jauh. Kami lakukan untuk menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai wartawan.*

**11. Factor apa yang menjadi pertimbangan untuk memilih berita yang layak dan yang tidak ?**

*Jawab : Harus pandai memilih, menganalisa untuk nanti dikonfirmasi ke narasumber dan mana yang memiliki nilai berita itulah yang menjadi berita.*

**12. Nilai beritanya seperti apa?**

*Jawab : Baru dan menarik artinya sebelumnya ada tapi berkembang, kedekatan dengan media dan keakraban dengan khalayak.*

**13. Melihat pemberitaan SOLOPOS tentang GLA mengapa SOLOPOS mengambil tema pemberitaan seperti itu ?**

*Jawab : Pemberitaan SOLOPOS tentang GLA selalu cover both side tidak pernah memandang siapa salah dan benar. Apa yang terjadi dilapangan itulah yang diberitakan. GLA berdampak cukup besar bagi masyarakat Karanganyar. Proyek yang mestinya untuk warga menengah ke bawah dan sudah sangat diharapkan ternyata ditengah jalan karena ada oknum- oknum yang bermain. Dana digelapkan hingga puluhan miliar rupiah. Karena itulah SOLOPOS mengambil berita tentang GLA dan fokus*

**14. Pers itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi citra orang perorang, bisa memberikan kesan positif atau sbaliknya?**

*Jawab : Sebuah berita terkadang biasa dipersepsikan berbeda- beda bagi yang membacanya. Sebuah berita positif memang biasa mempengaruhi citra seseorang terutama pejabat daerah yang biasa berhubungan langsung dengan masyarakat.*

**15. Pertama kali yang memunculkan wacana Rina korupsi siapa?**

*Jawab : Dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa ternyata aliran dana GLA digunakan untuk kepentingan Rina Iriani hamper semua saksi yang dihadirkan mengarah kesana.*

**16. Penetapan rina sebaga salah satu penerima aliran dana dan sudah memiliki keabsahan ?**

*Jawab : Belum ada keabsahan karena Rina masih menjadi tersangka dalam kasus GLA ini.*

**17. Mohon penjelasan tentang dugaan korupsi yang dilakukan Rina Iriani terhadap GLA?**

*Jawab : GLA berdampak cukup besar bagi masyarakat Karanganyar. Proyek yang mestinya untuk warga menengah ke bawah dan sudah sangat diharapkan ternyata ditengah jalan karena ada oknum- oknum yang bermain. Dana digelapkan hingga puluhan miliar rupiah. Karena itulah SOLOPOS mengambil berita tentang GLA dan focus. Dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa ternyata aliran dana GLA digunakan untuk kepentingan Rina Iriani hamper semua saksi yang dihadirkan mengarah kesana.*

**18. Apa mekanisme control dari redaksi ?**

*Jawab : Biasanya redaktur masing- masing desk melakukan pertemuan degan wartawannya, nanti membicarakan masalah tentang keredaksian, tentang pemberitaan dan lewat penyuntingan akhir redaktur dan rapat redaksi.*

**19. Bagaimana pendapat anda mengenai Kasus GLA?**

*Jawab: kasus GLA merupakan kasus besar yang mampu menyedot perhatian warga Karanganyar selama kepemimpinan Bupati Rina Iriani. Kasus ini berawal dari mangkraknya pengerjaan mega proyek perumahan bersubsidi yang mestinya untuk kalangan menengah ke bawah atau kaum buruh, bahkan diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Belum rampungnya proyek tersebut lantaran dana kucuran dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) diduga digunakan untuk kepentingan pencalonan Bupati rina Iriani yang saat itu merupakan calon incumbent maju dalam Pilkada 2008. Bahkan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Bupati Rina dan suaminya Tony Haryono sehingga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.*

**20. Bagaimana keterlibatan Bupati Karanganyar rina iriani terhadap kasus GLA ini ?**

*Jawab: keterlibatan bupati dalam kasus ini belum ada ketetapan hukum tetap. Artinya keterlibatan bupati hanya sebatas disebut dalam fakta persidangan. Di mana semua saksi-saksi yang dihadirkan termasuk terpidana kasus GLA baik Ketua KSU Sejahtera Handoko Mulyono, mantan Ketua KSU Sejahtera Fransisca Rianasari maupun Dewan Pengawas sekaligus suami Rina Iriani, Tony Haryono menyebutkan keterlibatannya. Rina diduga menggunakan dana bantuan Kemenpera itu untuk kepentingan pribadi maupun Pilkada 2008 silam. Total dana yang digunakan Rina mencapai hingga Rp 11 miliar lebih.*

*Meski terungkap dalam fakta persidangan keterlibatannya itu, namun hingga kini belum ada langkah lanjutan adanya kepastian hukum keterlibatannya. Bupati Rina masih melenggang bebas meski dalam surat dakwaan, tuntutan*

*maupun vonis persidangan disebutkan secara jelas keterlibatannya menikmati aliran dana GLA.*

**21. Menurut anda apakah kasus ini sudah masuk dalam kasus tindak korupsi ?**

*Jawab: tentu sudah masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Karena dana yang mestinya digunakan untuk kepentingan membangun rumah bersubsidi namun tidak digunakan sebagaimana mestinya.*

**22. Menurut anda apa factor terjadinya tindak korupsi ini dan apakah hal ini berpengaruh untuk daerah karanganyar sendiri ?**

*Jawab: Kasus GLA jelas berpengaruh terhadap wilayah karanganyar sendiri baik langsung maupun tidak langsung. Langsung artinya kasus ini masyarakat kecil tidak bisa mendapatkan bantuan yang mestinya diberikan pemerintah pusat. Secara tidak langsung mengganggu keharmonisan partai politik (Parpol) di karanganyar.*

**23. Bisakah anda bercerita tentang kasus GLA ? dan pengalaman anda saat meliput kejadian ini ? hal yang menarik, mengerikan ataupun menyenangkan yang terjadi di lapangan saat meliput kejadian ini ?**

*Jawab: pengalaman menarik selama liputan GLA adalah selalu mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu. Bahkan sering mendapatkan telepon gelap hingga sms gelap ancaman terkait tulisan GLA. Sering kali bahkan menerima tindakan tidak menyenangkan dari pejabat dishubkominfo karanganyar.*

**24. Menurut anda siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini ?**

*Jawab; pihak paling bertanggungjawab adalah mereka yang menggunakan dana GLA baik untuk kepentingan pribadi atau lainnya.*

**25. Bagaimana situasi saat peliputan kejadian tersebut ?**

*Jawab: situasi peliputan sangat ramai dan mampu menyedot perhatian masyarakat. bahkan belasan personil aparat kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang. Tidak hanya itu intel-intel baik Polres, kodim maupun Pemkab ada di sana ikut mengawasi jalannya sidang.*

**26. Bagaimana prosedur penugasan untuk peliputan kasus korupsi tersebut ?**

*Jawab: tidak ada penugasan khusus. kami hanya menjalankan tugas sesuai agenda sidang dan mencari informasi lainnya di luar sidang GLA.*

**27. Adakah pembagian tugas antara rekan wartawan sendiri yang dilakukan diluar rapat redaksi ?**

*Jawab: ada. Biasanya kami bagi tugas satu meliput sidang dan satunya meliput lainnya yang berhubungan langsung di lapangan, seperti mereka yang membeli rumah GLA dan lain sebagainya.*

**28. Persiapan apa yang anda lakukan untuk diri anda sendiri sebelum melakukan tugas peliputan, khususnya peliputan GLA ini ? (draftpertanyaan, angle apa yang akan diangkat, narasumber,dll)**

*Jawab: tidak ada persiapan khusus. hanya persiapan fisik dan isu yang akan digarap. Angle berita diambil sesuai dengan isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat.*

**29. Apa latar belakang/ alasan/ pertimbangan anda dalam memilih narasumber yang akan dimintai keterangan ?(khususnya dalam kasus GLA)**

*Jawab: narasumber dipilih adalah mereka yang mengetahui kasus tersebut. Selain itu ahli dan berkaitan erat dengan kasus GLA seperti Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri (PN), pengacara dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsen terhadap kasus ini.*

**30. Pertanyaan seputar apa yang disampaikan kepada narasumber tersebut? (pertanyaan yang menajebak, meminta solusi, pendapat pribadi atau bagaimana?)**

*Jawab: pertanyaan yang kami ajukan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tidak ada pertanyaan yang menajebak ataupun menyudutkan narasumber. Hal ini sesuai dengan tugas wartawan bukanlah untuk menyudutkan narasumber. Tapi kami bekerja sesuai fakta yang ada.*

**31. Berdasarkan pengalaman anda, solusi seperti apa untuk kasus ini ?**

*Jawab: solusi harus diselesaikan secara hukum hingga tuntas sampai ke akar-akarnya. Aktor intelektual dari kasus tersebut harus diusut tuntas.*

### **Pertanyaan yang berkaitan dengan SOLOPOS**

**1. Bagaimana tahap atau proses sampai anda masuk menjadi wartawan SOLOPOS (melalui interview, tes, dll)**

*Jawab: saya menjadi wartawan solopos sebelumnya mengikuti magang pendidikan dari kampus atau biasa disebut PKL (Pendidikan Kerja Lapangan) selama satu bulan di Solopos. Kemudian diminta untuk terus di SOLOPOS hingga akhirnya langsung menjadi wartawan magang selama satu tahun baru kemudian ditetapkan menjadi karyawan tetap. Saya tidak ada menggunakan proses wawancara ataupun ujian masuk solopos.*

**2. Mengapa anda memilih bergabung menjadi wartawan SKH SOLOPOS?**

*Jawab: saya merasa SOLOPOS media lokal besar yang ada di wilayah Soloraya. saya ingin masuk dan bergabung dengan SOLOPOS untuk lebih meragamkan karya jurnalistik di media tersebut.*

**3. Apa pendapat anda mengenai kinerja dan sinergi kerja yang terjadi di SKH SOLOPOS?**

*Jawab: kinerja dan sinergi kerja baik antara reporter dan redaktur berjalan baik. Meski setiap hari tidak diharuskan ke kantor tapi selalu ada koordinasi bersama melalui sms, telpon dan lain sebagainya.*

**4. Apa motto kerja di SOLOPOS? Apakah anda terapkan dalam menjalankan tugas sebagai wartawan ?**

*Jawab: ya*

**5. Adakah ideology dari SOLOPOS yang diterapkan/ditanamkan dalam benak anda sebagai pekerjanya? Ideology seperti apa? Dan setujuakah anda dengan ideology itu ?**

*Jawab: ideologi tidak menerima amplop. Saya sangat setuju dan menerapkannya dalam setiap menjalankan tugas jurnalistik. Karena menurut saya dengan menerima amplop akan berpengaruh terhadap keprofesionalan dalam menjalankan tugas wartawan.*

**6. Hal apa yang membuat bangga menjadi salah satu bagian dari SKH SOLOPOS?**

*Jawab: karena solopos media lokal terbesar di soloraya.*

**7. Menurut anda, bagaimana SOLOPOS menyikapi kasus korupsi perumahan GLA dan keterlibatan Rina iriani dalam pemberitaan ?( mengingat solopos merupakan Koran lokal yng berada di solo)?**

*Jawab: dalam menyikapi kasus GLA solopos selalu menjadi media yang mengedepankan asas perimbangan atau balance. Jadi meski terungkap dalam fakta persidangan, kami selalu meminta konfirmasi narasumberr yang bersangkutan.*

**8. Adakah larangan / pantangan yang diberikan SOLOPOS saat melakukan tugas peliputan dilapangan ? jika iya seperti apa?**

*Jawab: kami tidak pernah ada larangan apapun dalam menjalankan tugas. Apa yang ada di lapangan (Fakta) itulah yang ditulis.*

**9. Menurut anda, bagaimana sikap dan respon masyarakat terhadap SKH SOLOPOS dalam memberitakan mengenai kasus GLA tersebut ?**

*Jawab: respon sangat positif. Masyarakat memberikan apresiasi tinggi bagi media yang mengangkat kasus GLA dan terus konsen dalam memberitakan kasus GLA.*

**10. Apa saran, kritik atau masukan yang anda berikan untuk SOLOPOS? (secara umum dan khusus dalam menghadapi kasus GLA ini ?**

*Jawab: saran terus konsen mengangkat dan mengawal kasus GLA hingga tuntas.*

## DATA NARASUMBER

### WARTAWAN SOLOPOS

16. Nama Lengkap : Triyono
17. Jabatan/ pekerjaan : Reporter/ Wartawan
18. TTL : Karanganyar, 7 Oktober 1980
19. Jenis Kelamin : laki- laki
20. Hobby : Membaca
21. Agama : Islam
22. Status Perkawinan :
23. Jumlah anak :
24. Suku :
25. Kota Asal : Karanganyar
26. Alamat Rumah : Jl Adi Sucipto No 190 Solo
27. Tlp\HP : 081391942289
28. Masuk SOLOPOS sejak : Maret 2007
29. Sejarah Pendidikan  
Perguruan Tinggi : S1 Fisipol UGM Yogyakarta
30. Sejarah Pekerjaan  
Tahun Pekerjaan  
2007-Sekarang Reporter SOLOPOS

## **Wawancara dengan Triyono**

**Wartawan Solopos peliput Kasus dugaan Korupsi Perumahan Griya Lawu**

**Asri**

**Bertugas di wilayah Karanganyar**

**Rabu, 27 April 2011 pukul 10.00 WIB, di via email 081329354225**

### **1. Bagaimana pendapat anda mengenai Kasus GLA?**

*Jawab : GLA merupakan proyek perumahan untuk pekerja dan buruh berpenghasilan rendah yang dalam pelaksanaannya diduga terjadi penyimpangan.*

### **2. Bagaimana keterlibatan Bupati Karanganyar Rina iriani terhadap kasus GLA ini ?**

*Jawab : Keterlibatan Rina Iriani baru sebatas dugaan. Banyak pihak menilai hal itu mengacu kepada peran bupati (sebagai pejabat daerah) pada saat pra dan ketika pelaksanaan proyek perumahan Griya Lawu Asri (GLA). Perlu pembuktian melalui proses hukum.*

### **3. Menurut anda apakah kasus ini sudah masuk dalam kasus tindak korupsi ?**

*Jawab : Data-data dan informasi mengenai penyimpangan proyek menguatkan dugaan adanya korupsi dalam proyek GLA. Pengadilan atas dua terdakwa Handoko Mulyono dan Tony Haryono membuktikan kasus GLA sebagai tindak pidana korupsi.*

### **4. Menurut anda apa faktor terjadinya tindak korupsi ini dan apakah hal ini berpengaruh untuk daerah karanganyar sendiri ?**

*Jawab : Lemahnya pengawasan pra dan saat pelaksanaan proyek menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan proyek. Tentu berpengaruh karena subsidi dari pemerintah yang menjadi hak pekerja dan buruh berpenghasilan rendah akhirnya tak tersalurkan sebagaimana mestinya.*

### **5. Menurut anda sendiri, pengertian korupsi itu apa dan penyebab terjadinya tindak korupsi itu apa?**

*Jawab : Pejabat/orang yang karena kewenangannya berbuat melawan hukum untuk kepentingan pribadi/golongan dan mengakibatkan timbulnya kerugian negara.*

- 6. Bisakah anda bercerita tentang kasus GLA ? dan pengalaman anda saat meliput kejadian ini ? hal yang menarik , mengerikan ataupun menyenangkan yang terjadi di lapangan saat meliput kejadian ini ?**

*Jawab : Kasus GLA membuat semua orang penasaran. Hal itu karena nilai kerugian yang mencapai Rp 22 miliar (versi BPKP), sangat besar untuk ukuran proyek di level kabupaten. Peliputan tentang GLA dengan sendirinya menjadi tantangan untuk jurnalis peliput di wilayah kabupaten karanganyar. Proses peliputan tidak banyak berbeda dengan berita-berita lain, tetapi risikonya memang lebih tinggi/besar.*

- 7. Menurut anda siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini ?**

*Jawab : Penyimpangan terjadi tidak hanya karena kesalahan salah satu pihak. Semua yang terlibat sudah semestinya dimintai pertanggungjawaban.*

- 8. Bagaimana situasi saat peliputan kejadian tersebut ?**

*Jawab : Situasi peliputan kasus GLA tidak jauh berbeda dengan berita-berita lain. Yang membedakan mungkin akan ada lebih banyak tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.*

- 9. Bagaimana prosedur penugasan untuk peliputan kasus korupsi tersebut ?**

*Jawab : Tidak ada prosedur penugasan khusus. Reporter diminta selalu berhati-hati saat bertugas dan menginformasikan kepada perusahaan jika menemui hambatan/kendala. Tidak terkecuali soal kemungkinan ancaman/intimidasi.*

- 10. Adakah pembagian tugas antara rekan wartawan sendiri yang dilakukan diluar rapat redaksi ?**

*Jawab : Pembagian tugas dilakukan menyesuaikan kebutuhan dan jika dipandang perlu.*

- 11. Persiapan apa yang anda lakukan untuk diri anda sendiri sebelum melakukan tugas peliputan, khususnya peliputan GLA ini ? (draft pertanyaa, angle apa yang akan diangkat, narasumber,dll)**

*Jawab : Persiapan peliputan GLA sama seperti halnya saat peliputan berita-berita lain. Tidak ada persiapan khusus.*

**12. Apa latar belakang/ alasan/ pertimbangan anda dalam memilih narasumber yang akan dimintai keterangan ?(khususnya dalam kasus GLA)**

*Jawab : Kompetensi/kapasitas narasumber, sama juga seperti saat mencari/meliput berita-berita lain. Selain itu melihat peran, posisi, dan keterlibatan dalam pelaksanaan proyek dan sering menyesuaikan dengan perguliran isu yang berkembang.*

**13. Apakah pemilihan siapa narasumber yang akan dimintai keterangan/ pendapatnya sudah ditentukan dalam rapat redaksi ?**

*Jawab : Selama ini belum/tidak. Tergantung inisiatif wartawan saja.*

**14. Pertanyaan seputar apa yang disampaikan kepada narasumber tersebut ? (pertanyaan yang menjabak, meminta solusi, pendapat pribadi atau bagaimana?)**

*Jawab : Pertanyaan tergantung siapa yang diwawancarai. Narasumber satu dan yang lain mendapat pertanyaan berbeda, menyesuaikan kapasitas masing-masing. Penegak hukum (kejaksaan) mungkin ditanyai menyangkut proses hukum, bukti-bukti, dan pihak yang terlibat dalam perkara. DPRD, ditanya terkait solusi soal bagaimana subsidi dari pemerintah bisa tersalurkan, tanggapan terhadap proses hukum, dll. Tidak ada pertanyaan menjabak, yang ada meminta tanggapan, pendapat, atas isu atau kasus GLA yang sejak awal kemunculannya menjadi perhatian publik.*

**15. Berdasarkan pengalaman anda, solusi seperti apa untuk kasus ini ?**

*Jawab : Solusi kasus GLA. Banyak pihak mendesak diselesaikan secara hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu proyek dilanjutkan dan subsidi disalurkan ke yang berhak seperti sebagaimana mestinya.*

**Pertanyaan yang berkaitan dengan SOLOPOS**

**1. Bagaimana tahap atau proses sampai anda masuk menjadi wartawan SOLOPOS (melalui interview, tes, dll)**

*Jawab : Seperti umumnya rekrutmen tenaga kerja di perusahaan-perusahaan lain. Seleksi untuk bergabung di Solopos melalui tes tertulis, interview, psikotes.*

**2. Mengapa anda memilih bergabung menjadi wartawan SKH SOLOPOS?**

*Jawab : Sebagai grup Bisnis Indonesia, Solopos cukup bonafide.*

**3. Apa pendapat anda mengenai kinerja dan sinergi kerja yang terjadi di SKH SOLOPOS ?**

*Jawab : Sudah baik. Tapi tentu harus semakin ditingkatkan untuk perbaikan ke depan.*

**4. Apa motto kerja di SOLOPOS? Apakah anda terapkan dalam menjalankan tugas sebagai wartawan ?**

*Jawab : SOLOPOS mengiringi perubahan, sumber inspirasi. Prinsip saya sederhana saja, profesional dalam bekerja, menjunjung tinggi kode etik profesi.*

**5. Adakah ideologi dari SOLOPOS yang diterapkan/ditanamkan dalam benak anda sebagai pekerjanya? Ideologi seperti apa? Dan setujukah anda dengan ideologi itu ?**

*Jawab : Media mempunyai tanggung jawab kepada publik selaku stake holders. Penyampaian informasi harus dilakukan secara berimbang, transparan, dan mengedepankan kepentingan umum. Utamanya dalam posisinya sebagai kontrol terhadap kekuasaan*

**6. Hal apa yang membuat bangga menjadi salah satu bagian dari SKH SOLOPOS?**

*Jawab : Mengabdikan untuk kepentingan masyarakat, mengedepankan idealisme.*

**7. Menurut anda, bagaimana SOLOPOS menyikapi kasus korupsi perumahan GLA dan keterlibatan Rina iriani dalam pemberitaan ?( mengingat solopos merupakan Koran lokal yang berada di solo)?**

*Jawab : Saya menilai sudah proporsional.*

**8. Adakah larangan/pantangan yang diberikan SOLOPOS saat melakukan tugas peliputan dilapangan ? jika iya seperti apa?**

*Jawab : Ada. Dilarang menerima sesuatu pemberian dari narasumber dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.*

## Lampiran Foto Redaksi SOLOPOS

